



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGELOMPOKAN PROPINSI BERDASARKAN
PENERIMAAN PAJAK-PAJAK PUSAT TAHUN 2008**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ekonomi (M.E.)**

**S U M A R N O
NPM 660529225Y**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
JAKARTA
SEPTEMBER 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGELOMPOKAN PROPINSI BERDASARKAN
PENERIMAAN PAJAK-PAJAK PUSAT TAHUN 2008**

TESIS

**S U M A R N O
NPM 660529225Y**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
SEPTEMBER 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Sumarno

NPM : 660529225Y

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Judul Tesis : Analisis Pengelompokan Propinsi Berdasarkan Penerimaan Pajak- Pajak Pusat Tahun 2008

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.) pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Khoirunurrofik, M.A., M.PM, ()

Penguji : DR. Andi Fahmi Lubis ()

Penguji : Iman Rozani, M.Soc.Sc. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 September 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sumarno

NPM : 660529225Y

Tanda Tangan :

Tanggal : 29 September 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sumarno

NPM : 660529225Y

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Pengelompokan Propinsi Berdasarkan Penerimaan
Pajak-Pajak Pusat Tahun 2008**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 29 September 2009

yang menyatakan

(Sumarno)

KATA PENGANTAR

Bismillahirraamaanirrohiim

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, dengan penuh rasa syukur penulis mengucapkan *hamdallah* karena hanya atas perkenan ALLOH SWT-lah penulis mendapat anugerah menuntut ilmu di Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP), FE-UI serta dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang tulus tak lupa penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membimbing sehingga terselesaikannya seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran di MPKP sampai dengan penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada:

1. Pimpinan MPKP: Bapak DR. Arindra A. Zainal selaku Ketua Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dan Bapak DR. Andi Fahmi Lubis selaku Sekretaris Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik sekaligus sebagai Dosen Ketua Sidang Penguji Tesis;
2. Mantan Pimpinan MPKP: Bapak DR. B. Raksaka Mahi selaku mantan Ketua Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dan Ibu Hera Susanti, S.E., M.Sc. selaku selaku mantan Sekretaris Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik;
3. Bapak Khoirunurrofik, M.A., M.P.M., selaku dosen pembimbing tesis, yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga selesainya penulisan tesis ini;
4. Bapak Iman Rozani, S.E., M.Soc. Sc., selaku dosen yang memberikan nasihat dan dorongan dalam penyusunan tesis, serta selaku Dosen Penguji dalam Sidang Tesis yang telah memberikan saran dan bimbingan perbaikan tesis ini;
5. Para dosen Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE-UI;
6. Bapak Haris Wirawan, selaku Kepala Bagian Akademik MPKP yang selalu memberikan solusi permasalahan akademik penulis;

7. Para Bapak dan Ibu Pejabat dan Staf di Sekretariat Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE-UI, *wabil* khusus Mas Dedhi (sebelum Beliau *resign* dari MPKP), Mas Triman, Mba Siti, Mba Irma, Mba Ira, Mba Warni, Mba Keke, dan yang lainnya yang dengan sabar melayani segala keperluan mahasiswa;
8. Pimpinan dan rekan-rekan kerja yang telah memberikan izin, dorongan semangat, dan pengertian atas penyelesaian tesis ini;
9. Kerabat dan keluarga di rumah; orang tua, saudara, isteri, dan anak-anak atas kasih sayang dan dorongan untuk terus berusaha menyelesaikan kuliah, terutama menyelesaikan tesis ini;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu penyelesaian tesis ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga mereka semua selalu mendapat perlindungan ALLOH SWT, dan terhadap sumbangsuhnya ditetapkan sebagai amal ibadah, karena berkat kemurahan hati merekalah semua ini dapat terselesaikan.

Kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat mendorong penelitian yang lebih baik, sehingga menjadi amal soleh.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan dan pasti memiliki kesalahan serta kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan demi perbaikan dan kemajuan penulis pada masa yang akan datang sangat diharapkan. Terhadap kesalahan dan kekurangan tersebut penulis mohon ma'af.

Jakarta, September 2009

Penulis,

Sumarno

ABSTRAK

Nama : Sumarno / NPM 660529225Y
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Analisis Pengelompokan Propinsi Berdasarkan Penerimaan Pajak-Pajak Pusat Tahun 2008

Tesis ini membahas evaluasi kinerja penerimaan pajak pusat di setiap propinsi dengan mengukur *tax ratio* regional agar diketahui perbedaan jarak (*gap*) antara *tax ratio* regional yang dicapai dengan *tax ratio* regional yang seharusnya. Kemudian membandingkan *tax ratio* regional suatu propinsi dengan propinsi lainnya. *Tax ratio* regional yang merupakan indikator besarnya tingkat pemungutan pajak (*level of taxation*) di suatu propinsi.

Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi *tax ratio* regional serta berhasil mengelompokkan propinsi menurut kesamaan karakteristik variabel-variabel yang mempengaruhinya.

Kata kunci:

Tax ratio regional, kelompok propinsi.

ABSTRACT

Name : Sumarno / NPM 660529225Y
Study Program : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Province Clustering Analysis Base on Central Tax Revenues Year 2008

This study describes the performance evaluation of the central tax revenue in each province by measuring the regional tax ratio to be known the gap between the actual tax ratio and the potential tax ratio. Then compare the regional tax ratio of a province with other provinces. Regional tax ratio is an indicator of magnitude level of taxation in a province.

The study also identified variables that significantly influence the regional tax ratio and formed cluster of province according to common characteristics of the variables that influence it.

Key words:

Regional tax ratio, province cluster

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penulisan Tesis	7
1.4. Hipotesis Penelitian	8
1.5. Batasan dan Alasan Penulisan	8
1.6. Metodologi Penelitian	9
1.7. Sistematika Penulisan	11
2 TINJAUAN LITERATUR	12
2.1. Pajak Dalam APBN	12
2.2. Kajian Terkait	15
2.3. Pengelompokan Wajib Pajak oleh DJP	22
3 METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1. Sumber Data	24
3.2. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis	27
3.3. Analisis Regresi	29
3.4. Multivariate Cluster Analysis	29
4 HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Umum	32
4.2. Hasil Analisis Deskriptif	32
4.3. Hasil dan Analisis Regresi	47
4.4. Hasil dan Analisis Pengelompokan	56
5 KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Hasil dan Analisis Regresi	62
5.3. Hasil dan Analisis Pengelompokan	63
5.4. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Hasil Pengolahan Data Dengan Regresi
Lampiran II	Hasil Pengolahan Data Dengan Clustering
Lampiran III	Rekapitulasi Data Regresi dan Clustering
Lampiran IV	Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak
Lampiran V	Daftar Realisasi Penerimaan Pajak
Lampiran VI	Daftar Variabel Potensi Penerimaan Pajak
Lampiran VII	Daftar Perkembangan PPh Non Migas Sektor 2005-2008 dan Perkiraan Realisasi 2009
Lampiran VIII	Daftar Perkembangan PPN Dalam Negeri 2005-2008 dan Perkiraan Realisasi 2009



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2004 s.d. 2008	2
1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2008	4
3.1 Variabel Data	25
4.1 Kontribusi Penerimaan Pajak	43
4.2 Urutan Tax Ratio Regional Aktual Tahun 2008	48
4.3 Urutan Tax Ratio Regional Potensial Tahun 2008	51
4.4 Kelompok Propinsi Dengan Tax Ratio Residual Positif	52
4.5 Kelompok Propinsi Dengan Tax Ratio Residual Negatif	53
4.6 Index Of Tax Effort Regional Tahun 2008	54
4.7 Kelompok Propinsi	57

DAFTAR GRAFIK

4.1 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan	36
4.2 Penerimaan PPN dan PPn BM	38
4.3 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	39

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi perpajakan yang telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1984 sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan telah mulai menunjukkan keberhasilannya. Hal ini tampak dari sumbangan penerimaan pajak yang semakin dominan dalam pendapatan negara. Penerimaan pajak yang dalam periode 1980-an menyumbang sekitar 37 persen dari penerimaan dalam negeri, selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga menjadi sekitar 57 persen dalam periode 1990-an, kemudian menjadi sekitar 69,5 persen pada tahun 2007. Dalam Data Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2009, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dilihat bahwa diharapkan sumber penerimaan terbesar negara Indonesia sekitar 71,1%-nya berasal dari sektor pajak, sehingga pada tahun 2009 ditargetkan penerimaan negara dari pajak sebesar Rp726,3 triliun.

Upaya peningkatan penerimaan pajak terus dilakukan agar potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat direalisasikan, yang salah satunya dengan mendorong kinerja aparat pajak. Bahkan sejalan dengan tiga agenda utama reformasi birokrasi di Departemen Keuangan, yang meliputi; penataan organisasi, penyempurnaan *business process*, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, DJP selaku pemegang mandat pengelola penerimaan negara sektor perpajakan telah melakukan modernisasi, yaitu dengan telah dilakukan perubahan kelembagaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja birokrasi dalam menyusun kebijakan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Sebagai upaya untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dalam tahun 2009, sebagaimana diungkapkan dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2009, akan menempuh langkah-langkah kebijakan perpajakan yang meliputi: (i) intensifikasi perpajakan melalui kegiatan pemetaan (*mapping*), pembuatan profil wajib pajak, pembuatan patokan keuntungan untuk industri atau

sektor tertentu (*benchmarking*), pemanfaatan data pihak ketiga, serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan; (ii) ekstensifikasi perpajakan guna memperluas basis pajak yang layak dikenakan; (iii) pelaksanaan amandemen Undang-undang PPh dan PPN; serta (iv) peningkatan kepatuhan wajib pajak (*law enforcement*), terutama untuk menindaklanjuti kebijakan *sunset policy* di tahun 2008.

1.1.1. Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak merupakan salah satu ukuran keberhasilan kinerja penerimaan pajak yang pengukurannya dengan membandingkan antara target yang harus dicapai dengan realisasi yang telah diperoleh. Kinerja penerimaan pajak secara nasional dalam 5 tahun terakhir tidak selalu dapat tercapai. Hal ini tampak dari realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target yang harus dicapai (**Tabel 1.1**). Pada tabel tersebut dalam masa 5 tahun, target penerimaan pajak yang dapat terealisasi diatas target adalah pada tahun 2004 dan 2008. Pada tahun 2004 penerimaan pajaknya mencapai 100,29%. Bahkan pada tahun 2008 dalam kondisi perekonomian dunia yang sedang dilanda krisis, realisasi penerimaan pajak justru mencapai 112,23% atau melebihi target sebesar Rp65.376.481.543.396,00. Realisasi penerimaan pajak yang dibawah target terjadi berturut-turut dari tahun 2005 yaitu sebesar Rp331,79 triliun atau 99,22% dari target. Sedangkan pada tahun 2006 tingkat penerimaan pajaknya merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 96,53% dari target. Kemudian pada tahun 2007 penerimaan pajak yang dicapai sebesar Rp470,05 triliun atau 99,05% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Tahun 2004 s.d. 2008

TAHUN	TARGET	REALISASI	SELISIH	%
2004	267.033.380.000.000	267.817.030.241.314	783.650.241.314	100,29
2005	334.403.230.000.000	331.791.493.009.918	(2.611.736.990.082)	99,22
2006	410.226.380.000.000	395.971.535.630.012	(14.254.844.369.988)	96,53
2007	474.550.950.000.000	470.051.815.733.040	(4.499.134.266.960)	99,05
2008 *)	534.500.000.000.000	599.876.481.543.396	65.376.481.543.396	112,23
Ket. : *) Bahan penyusunan LKPP tahun 2008 (unaudited)				

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) - audited

Kemudian pada tataran yang lebih mikro target dan realisasi penerimaan pajak pada tingkat kantor wilayah (Kanwil) tampak antara penetapan target pada awal tahun dengan realisasinya sangat berbeda (**Tabel 1.2**). Tabel ini merupakan rasio realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak per Kantor Wilayah DJP. Target penerimaan bersumber dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-06/PJ/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Distribusi Rencana Penerimaan PPh Non Migas, PPN dan PPn BM, Pajak Lainnya, serta PBB dan BPHTB. Sedangkan realisasi penerimaan pajak bersumber dari Sistem Informasi Perpajakan (SIP) DJP dan Modul Penerimaan Negara Ditjen Perbendaharaan Negara. Dalam tabel tersebut tampak bahwa rasio penerimaan pajak PPh 21 seluruhnya dapat tercapai, 25 kanwil diantaranya dapat merealisasikan di atas 120%, bahkan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara realisasinya mencapai 249,71%. Untuk realisasi PPh Orang Pribadi (PPh OP) disamping banyak kanwil yang dapat melampaui target, bahkan 5 kanwil realisasinya antara 207,36% sampai dengan 315,15%, juga terdapat kanwil yang tidak dapat merealisasikan target penerimaan pajak, yaitu; Kanwil DJP Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Khusus, Jawa Barat II, Kalimantan Tengah dan Selatan, serta Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Penerimaan PPN dan PPn BM antara yang melebihi target dan yang tidak dapat mencapai target cukup berimbang. Rasio penerimaan jenis pajak ini pada kanwil yang realisasinya melebihi target tidak terlalu jauh dari yang direncanakan atau antara 101,98% s.d. 116,91%, kecuali Kanwil DJP Sumatera Utara yang mencapai 407,83%. Sedangkan yang dibawah target dengan prosentase realisasinya kurang dari 80% ada tiga kanwil yaitu Kanwil DJP Kalimantan Timur yang hanya dapat merealisasikan 63,81%, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara 76,58%, dan Kanwil DJP Jawa Timur III 79,93%.

Menurut rasio penerimaan PBB pada tabel tersebut, realisasi penerimaan PBB merupakan yang paling sesuai dengan target bila dibandingkan dengan jenis pajak yang lain, dimana baik yang dibawah target maupun yang diatas target tidak jauh menyimpang dari perencanaan. Hal ini bisa terjadi mengingat penerimaan

jenis pajak ini sangat ditentukan oleh besaran Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang telah ditentukan. Sedangkan jenis penerimaan BPHTB termasuk yang simpingannya besar, baik yang diatas target maupun yang dibawah target.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2008
(persentase)

NO	KANWIL	PPh 21	PPh OP	PPN & PPn BM	PBB	BPHTB
1	NAD	107,66	143,98	92,93	105,55	156,44
2	SUMUT I	157,56	207,36	407,83	111,72	119,53
3	SUMUT II	124,86	315,35	84,11	89,92	79,04
4	RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	127,24	120,03	97,44	103,62	107,23
5	SUMBAR DAN JAMBI	148,08	105,62	117,76	95,44	66,39
6	SUMSEL DAN BABEL	133,13	156,93	103,29	108,82	69,78
7	BENGKULU DAN LAMPUNG	158,23	114,89	82,26	105,35	82,14
8	JAKARTA PUSAT	140,26	120,69	106,74	101,74	80,01
9	JAKARTA BARAT	107,58	181,70	108,61	97,44	86,46
10	JAKARTA SELATAN	136,01	90,70	110,84	99,24	128,14
11	JAKARTA TIMUR	127,69	75,16	108,24	109,45	122,62
12	JAKARTA UTARA	117,57	175,89	102,86	107,82	113,36
13	JAKARTA KHUSUS	119,34	64,22	115,34	na	na
14	BANTEN	121,16	156,27	104,64	103,78	121,86
15	JABAR I	117,08	151,50	88,65	96,27	101,01
16	JABAR II	119,69	93,39	115,37	101,23	139,93
17	JATENG I	130,35	315,15	110,35	105,78	128,72
18	JATENG II	172,33	179,28	105,49	103,99	132,44
19	DI YOGYAKARTA	134,37	104,41	99,60	109,25	115,56
20	JATIM I	131,06	190,26	87,20	98,69	89,84
21	JATIM II	140,95	113,12	101,98	109,72	113,28
22	JATIM III	141,68	234,95	79,93	104,58	130,85
23	KALIMANTAN BARAT	161,82	160,95	112,70	106,17	117,86
24	KALTENG DAN KALSEL	157,42	57,05	89,29	101,76	100,27
25	KALTIM	154,28	168,33	63,81	109,10	144,12
26	SULSEL BARAT DAN TENGGARA	148,63	60,56	96,75	107,86	110,70
27	SULUT TENGGGO DAN MALUT	249,71	207,99	76,58	107,26	97,95
28	BALI	148,58	119,95	105,34	103,92	151,87
29	NUSA TENGGARA	135,59	116,45	84,34	97,20	115,94
30	PAPUA DAN AMBON	136,66	107,42	97,25	107,58	139,33
31	L T O	120,43	na	116,91	na	na

Sumber: DJP, diolah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa antar kantor wilayah bervariasi tingkat capaian realisasi penerimaan pajaknya. Hal ini terjadi karena penentuan target penerimaan pajak belum berdasarkan atas potensi pajak yang sesungguhnya. Tampak sekali bahwa pada kanwil yang dapat merealisasikan penerimaan pajak diatas target, banyak yang rasionya diatas 120% bahkan ada yang mencapai diatas 400%. Sebaliknya yang realisasi penerimaan pajaknya dibawah target banyak yang dibawah 80% bahkan ada yang hanya mencapai 57,05%.

Dalam pelaksanaannya, penetapan target penerimaan pajak yang telah disepakati pemerintah dengan DPR, kemudian oleh Direktorat Jenderal Pajak dibagikan besaran penerimaan pajak yang harus dicapai ke kantor-kantor wilayah yang menjadi unit vertikal dibawahnya. Dari masing-masing kanwil kemudian di-*break down* lagi ke masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayahnya. Pada tingkat KPP, target penerimaan pajak dibagikan ke masing-masing Account Representatif (AR) sesuai dengan jumlah dan jenis wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga penentuan target penerimaan pajak lebih bersifat *top down* dan berdasarkan *historical* penerimaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu diteliti untuk mengetahui tingkat capaian penerimaan pajak masing-masing propinsi dan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak yang kemudian dikelompokkan berdasar wilayah propinsi. Dari hasil pengelompokan tersebut dapat dilakukan pemetaan (*mapping*) potensi penerimaan pajak masing-masing propinsi tersebut berdasarkan variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tampak sumber penerimaan negara berupa pajak memiliki peran yang sangat besar dalam rangka membiayai pengeluaran negara. Peranan penerimaan pajak dalam membiayai pengeluaran negara tersebut tercermin dari semakin dominannya sumbangan pajak dalam APBN yang pada tahun 2009 ditargetkan mencapai 71%. Karena dilandasi oleh pentingnya penerimaan negara dari sektor pajak dalam APBN yang sekaligus merupakan cerminan kemandirian bangsa, maka pemerintah terus berupaya

meningkatkan penerimaan pajak dengan berbagai program yang mendukung upaya tersebut. Program tersebut berupa modernisasi perpajakan, reformasi birokrasi yang meliputi penataan organisasi, penyempurnaan *business process*, dan peningkatan sumber daya manusia, serta ekstensifikasi dan intensifikasi.

Upaya peningkatan penerimaan pajak oleh pemerintah terus dilakukan mengingat masih terdapat potensi yang belum tergali dan tergarap sebagaimana mestinya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax coverage ratio* yang membandingkan antara penerimaan pajak yang berhasil dipungut dengan potensi yang kemungkinan dihasilkan masih sangat besar untuk ditingkatkan, sebagaimana dikemukakan oleh Upal (2003) dalam bukunya *Tax Reform in Indonesia*, yang menyatakan bahwa: “*It is estimated that the domestic tax revenue to GDP ratio in Indonesia would be more than triple if all taxes were fully collected according to legal provisions.*” Pendapat Upal ini, walaupun masih menengarai adanya potensi pajak yang belum tergali sangat besar, namun mengindikasikan sudah adanya perbaikan bila dibandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh N. Kaldor (1992) sebagaimana dikutip oleh Camelia Suryana (2005), yang menyatakan bahwa potensi pajak di negara-negara berkembang jarang yang sudah tergali sepenuhnya yaitu tidak lebih dari seperlima atau sepersepuluh dari yang seharusnya terkumpul.

Oleh karena itu, terdapat berbagai pandangan ekonom tentang penilaian terhadap kinerja penerimaan pajak, salah satunya *tax ratio* yang sering dijadikan sebagai ukuran mengenai kinerja penerimaan pajak di banyak negara. Angka *tax ratio* tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja penerimaan pajak untuk mengukur indikator besarnya tingkat pemungutan pajak (*level of taxation*) di suatu negara, apakah sudah memadai atau belum, dengan cara membandingkan dengan *tax ratio* negara lain. Angka *tax ratio* yang semakin tinggi dihipotesiskan sebagai indikasi semakin membaiknya kinerja penerimaan pajak. Rasio ini dihitung dengan memperbandingkan jumlah penerimaan pajak dengan total produk nasional sebagaimana tergambar dalam produk domestik bruto.

Menurut Gunawan Setiyaji dan Hidayat Amir (2005), secara bertahap Indonesia telah mengalami peningkatan rasio pajak terhadap PDB. Namun, bila dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN, *tax ratio* Indonesia hanya lebih baik

dibandingkan dengan Kamboja dan Philipina. Menurut data dari ADB, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2002 sebesar 13,1%, sementara Malaysia, Thailand dan Vietnam memiliki *tax ratio* sebesar masing-masing 18,5% , 14,5% dan 15,3%. Pada tahun 2008 rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang ditargetkan mencapai 13,7% pun belum bisa dicapai. Bahkan sesuai dengan Nota Keuangan tahun 2009 targer *tax ratio* atau rasio penerimaan pajak terhadap PDB baru ditargetkan menjadi 15% sampai dengan tahun 2012. Artinya Indonesia masih harus bekerja keras untuk menaikkan *tax ratio*-nya sehingga mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan negara-negara asean terutama Malaysia dan Thailand.

Kemudian, untuk memperoleh gambaran *tax ratio* yang menunjukkan seberapa besar tingkat penerimaan pajak di suatu daerah, maka dapat digunakan *tax ratio* regional. *Tax ratio* regional merupakan perhitungan dengan cara membandingkan besarnya penerimaan pajak di suatu daerah dengan besarnya PDRB daerah tersebut. Angka *tax ratio* regional yang semakin tinggi merupakan suatu indikasi dari semakin baiknya kinerja penerimaan pajak pada wilayah tersebut. Atau semakin besar angka *tax ratio* regional, semakin besar pula kemampuan daerah dalam menjangkir penerimaan pajak atas potensi yang ada dalam wilayah itu. Oleh karena itu angka rasio tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja penerimaan pajak suatu daerah.

Salah satu potensi yang harus diperhatikan suatu wilayah propinsi dalam pemungutan pajak adalah *output* daerah/wilayah yang menjadi tanggung jawabnya (PDRB). Selain itu dalam melaksanakan pemungutan pajak juga berhubungan dengan luas wilayah kerja, jumlah penduduk yang dilayaninya, dan sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Wilayah kerja yang luas dan dukungan sumber daya yang terbatas akan mempengaruhi kemampuan dalam menggali potensi pajak.

1.3. Tujuan Penulisan Tesis

Untuk memperoleh gambaran penerimaan pajak menurut propinsi, maka perlu dilakukan suatu analisis yang dapat menjelaskan tingkat kemampuan pengumpulan pajak terhadap *output* produk domestik regional bruto (PDRB) yang dihasilkan propinsi berkenaan atau *tax ratio* regional. Dari *tax ratio* regional ini

dapat diketahui perbedaan jarak (*gap*) antara *tax ratio* regional yang dicapai atau *tax ratio* regional aktual dengan *tax ratio* regional yang seharusnya dapat diperoleh atau *tax ratio* regional potensial yang didasarkan pada variabel-variabel yang diasumsikan dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Kemudian dilakukan analisis yang dapat membentuk kelompok-kelompok propinsi dan mengidentifikasi variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi penerimaan pajak.

Oleh karena itu, secara spesifik tujuan penulisan tesis ini adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi penerimaan pajak per propinsi serta mengelompokkan propinsi-propinsi tersebut menurut kesamaan karakteristik variabel-variabel yang mempengaruhinya.

1.4. Hipotesis Penelitian

Atas dasar permasalahan dan tujuan penulisan tesis ini, maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis sebagai berikut:

- 1) *Tax ratio* regional aktual lebih kecil dibandingkan dengan *tax ratio* regional potensial.
- 2) Variabel PDRB, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Hasil Industri, Jumlah Karyawan Tetap, APBD, dan DIPA merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perbedaan *tax ratio* regional.

1.5. Batasan dan Alasan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini dilakukan terhadap realisasi penerimaan pajak seluruh propinsi se Indonesia yang meliputi 30 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak dari 31 Kanwil. Satu Kanwil dikeluarkan dari penelitian ini yaitu Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, dimana kanwil tersebut membawahi tiga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, yaitu; KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, dan KPP Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penerimaan pajak pada kanwil tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi distorsi penerimaan pada propinsi DKI Jakarta. Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan

pajak pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar merupakan penerimaan dari sekitar 3.000 WP besar di Indonesia, yang pelayanannya dipusatkan di Jakarta, serta penerimaannya mencapai Rp218,24 triliun atau hampir 40% dari penerimaan pajak. Dalam penelitian ini juga jenis penerimaan pajak yang dianalisis tidak seluruhnya, namun difokuskan pada jenis penerimaan pajak tertentu, yaitu; Total Penerimaan Pajak per Propinsi, PPh Orang Pribadi, PPh Badan, PPN dan PPhn Barang Mewah, serta PBB dan BPHTB sebagai bahan analisis deskriptif. Pemilihan jenis pajak tersebut karena secara umum keempat jenis pajak ini merupakan penyumbang penerimaan yang paling signifikan terhadap keseluruhan penerimaan pajak.

Alasan pemilihan data penerimaan pajak per propinsi adalah karena menurut penulis data ini akan mewakili seluruh wilayah Indonesia dalam proses analisis sehingga dapat menggambarkan peta penerimaan pajak secara keseluruhan. Dari data ini juga diharapkan dapat diperbandingkan antar berbagai propinsi sesuai dengan potensi penerimaan pajaknya. Sedangkan pemilihan realisasi penerimaan pajak tahun 2008, diharapkan merupakan gambaran keadaan potensi perpajakan yang mutakhir sehingga bila data ini digunakan untuk bahan analisis pengambilan keputusan dapat mendekati keadaan yang sesungguhnya.

Pemilihan tahun penelitian yang hanya satu tahun yaitu tahun pajak 2008 juga merupakan keterbatasan pada penelitian ini karena dengan hanya penelitian pada satu tahun tidak dapat mengetahui pergeseran atau perubahan kelompok propinsi pada tahun pajak yang lain.

1.6. Metodologi Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif, regresi dan analisis multivariat. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menghitung statistika deskriptif dari setiap indikator yang akan diteliti terkait dengan penerimaan pajak. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui perbedaan jarak (*gap*) antara *tax ratio* regional yang dicapai (aktual) dengan *tax ratio* regional yang seharusnya diperoleh (potensial). Selanjutnya analisis multivariat menggunakan analisis pengelompokan (*multivariate cluster analysis*). Analisis pengelompokan bertujuan untuk pengelompokan propinsi-propinsi yang mempunyai kesamaan

karakteristik berdasarkan indikator atau variabel yang terdiri dari PDRB, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Industri, Jumlah Karyawan Tetap, APBD, dan DIPA.

Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 2008 untuk penerimaan pajak dengan jenis pajak yang dianalisis; Total Penerimaan Pajak per Propinsi, PPh Orang Pribadi, PPh Badan, PPN dan PPn BM, serta PBB dan BPHTB sebagai sumber analisis deskriptif. Sedangkan data yang digunakan untuk analisis pengelompokan adalah total penerimaan pajak dibagi dengan variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak. Data ini bersumber dari Sistem Informasi Perpajakan (SIP) Direktorat Jenderal Pajak dan Modul Penerimaan Negara (MPN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan. Sedangkan data variabel potensi penerimaan pajak yang digunakan adalah Jumlah penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Karyawan Tetap, PDRB, Industri, APBD, dan DIPA. Data ini juga merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber. Variabel jumlah penduduk, jumlah karyawan tetap, PDRB dan Industri/produk manufaktur yang dihasilkan berasal dari BPS. Variabel APBD bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan. Data luas wilayah bersumber dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri. Sedangkan data DIPA bersumber dari Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2007 tentang Rincian Anggaran Tahun 2008.

Dengan lingkup data tersebut diharapkan dapat mendukung analisis permasalahan dan hipotesis yang akan diuji.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I. **Pendahuluan.** Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penulisan tesis, hipotesis penelitian, batasan dan alasan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisannya.

Bab II. **Tinjauan Literatur.** Pada bab ini diuraikan mengenai teori atau literatur yang berkenaan dengan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Diuraikan juga

pengelompokan yang sudah dilaksanakan berkenaan dengan penerimaan pajak berdasarkan jenis pajak.

- Bab III. **Metodologi.** Menjelaskan metodologi dan alat analisis penelitian serta asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, ruang lingkup, dan sumber data yang digunakan, pengolahan dan metode analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian data sebagai bahan analisis lebih lanjut.
- Bab IV. **Hasil dan Pembahasan.** Pada bab ini berisikan pembahasan dari analisis data dengan menggunakan metode yang telah ditentukan dan menginterpretasikan hasil pengujian dan analisis data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.
- Bab V. **Kesimpulan dan Saran,** bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penulisan tesis yang berisi kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan awal sampai akhir dan saran-saran yang dapat diberikan dalam menetapkan kegiatan yang perlu mendapat perhatian dalam penentuan rencana kebijakan untuk dapat menggali potensi penerimaan pajak yang lebih baik.

---oo0oo---

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

2. 1. Pajak Dalam APBN

Fungsi negara yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah adalah sebagai *agent of development*. Dalam menjalankan peran ini, pemerintah antara lain bertindak sebagai pendorong inisiatif atau pendorong motivasi rakyat dalam usahanya untuk mengadakan perubahan dan pembangunan masyarakat menuju ke arah kehidupan yang lebih baik, berupa pemberian fasilitas-fasilitas fisik, kemudahan dalam perijinan dan birokrasi, bimbingan dan kebijakan yang diarahkan kepada tercapainya pembangunan. Fungsi ini juga memberikan peran kepada pemerintah sebagai stabilisator, yaitu apabila di dalam pembangunan terjadi ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Fungsi ikutan berikutnya adalah sebagai inovator, yang berarti pemerintah harus dapat mengadakan penemuan-penemuan baru dalam metode maupun sistem untuk melaksanakan pembangunan.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Siagian (1985) sebagaimana dikutip oleh Entang Saefullah (2002) menyatakan bahwa dalam pembangunan pemerintah mempunyai fungsi-fungsi tertentu yaitu:

- a. *Pemerintah sebagai stabilisator*. Salah satu ciri-ciri dari negara yang terbelakang adalah bangsa-bangsa itu sering dilanda ketidakstabilan dibidang politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu salah satu fungsi yang sangat penting bagi pemerintah di bidang perekonomian adalah bertindak sebagai stabilisator.
- b. *Pemerintah sebagai inovator*. Pemerintah dalam suatu negara yang terbelakang harus mengusahakan agar pemerintah itu sebagai keseluruhan maupaun para pejabatnya sebagai sumber-sumber ide baru terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan.
- c. *Pemerintah sebagai pelopor*. Kepeloporan pemerintah bagi suatu negara yang sedang berkembang adalah sangat penting. Kepeloporan ini mencakup berbagai aspek kehidupan bangsa. Kepeloporan dalam suatu bidang akan berpengaruh positif terhadap bidang-bidang lainnya

Sejalan dengan fungsi tersebut, yang juga menjadi pendukung atas pelaksanaannya, adalah pemerintah sebagai pengelola keuangan negara. Keuangan negara menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Untuk itu, pemerintah setiap tahun memiliki hak dan kewajiban untuk menyusun anggaran.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia (APBN) terdiri dari, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan merupakan estimasi pendapatan yang mungkin dicapai dalam periode yang bersangkutan. Sedangkan anggaran belanja merupakan pagu anggaran belanja yang disediakan untuk membiayai program dan kegiatan selama tahun anggaran (*appropriation*). Kelompok anggaran pendapatan terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah.

Menurut Musgrave dan Musgrave (1993) anggaran mempunyai tiga macam fungsi yaitu:

- a. Fungsi alokasi, yaitu penyediaan barang sosial, atau proses pembagian keseluruhan sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi dan barang sosial, dan bagaimana komposisi barang sosial ditentukan.
- b. Fungsi distribusi, yaitu penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai keadaan distribusi yang “adil” dan “merata”.
- c. Fungsi stabilitasi, yaitu penggunaan anggaran sebagai suatu alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat dengan memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran.

Menurut Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 tahun 2002, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 72 tahun 2004, tentang pedoman pelaksanaan APBN pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan negara yaitu semua penerimaan yang berasal dari

penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara dinyatakan bahwa penerimaan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan hibah, penerimaan pengembalian belanja, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK).

Salah satu penerimaan negara adalah penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan penerimaan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang/jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Pajak mempunyai fungsi-fungsi dasar dan tujuan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional, yaitu:

- a. Fungsi budgeter, yaitu fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai keperluan negara baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan.
- b. Fungsi regulasi, yaitu fungsi untuk turut mengatur serta menciptakan iklim usaha yang tepat bagi perkembangan dunia usaha untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara serta tercapainya keseimbangan perekonomian dan politik.

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan bagian dari penerimaan negara dalam rangka kemandirian bangsa untuk pembangunan nasional. Dalam penghimpunannya penerimaan negara dari sektor pajak harus berpegang teguh atau selalu berusaha mengikuti asas produktivitas penerimaan. Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak tidak akan berarti jika hasil yang diperoleh tidak memadai atau tidak sebanding dengan upaya dan sumber daya yang dikeluarkan.

2.2. Kajian Terkait

Pajak pada umumnya didefinisikan sebagai iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan dari yang terutang dengan membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat jasa timbal balik dari negara secara langsung, yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka pencapaian kesejahteraan umum.

Dari berbagai definisi tentang pajak, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa aspek dasar:

- a. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan;
- b. Sifatnya dapat dipaksakan;
- c. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
- d. Tidak ada kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
- e. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah;
- f. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum; dan
- g. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Pada umumnya pajak dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu; pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak baik individu maupun badan dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Periode pemungutannya dilakukan sekali dalam setahun. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPH). Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Ditinjau dari periode pemungutan, maka pajak tidak langsung tidak mengenal periode pemungutan yang setahun sekali, melainkan setiap saat dapat terutang pajak. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selain pengelompokan pajak sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana diungkapkan oleh Safri Nurmantu (2003) pajak yang ditetapkan di Indonesia juga dibedakan jenisnya dengan menggunakan pendekatan yang digunakan oleh *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) seperti: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengacu pada *taxes on production, sale, transfer and delivery of goods and services*; Pajak Penghasilan (PPH) yang mengacu pada *personal tax income*; Bea Meterai yang mengacu pada *documentary stamp tax*; Pajak Bumi dan Bangunan mengacu pada *immovable property tax* atau *land tax* dan jenis pajak lainnya.

2.2.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

- a. Sesuai dengan berbagai hasil penelitian, terutama yang dikemukakan oleh Todaro (1999), sebagaimana dikutip oleh Camelia Suryana (2005), beberapa hal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat pendapatan perkapita, struktur perekonomian, distribusi pendapatan, keadaan sosial politik, dan administrasi pendapatan perpajakan.

Peningkatan pendapatan perkapita dan distribusi pendapatan akan memperluas basis pajak, yaitu obyek pajak, subyek pajak langsung dan tak langsung. Peningkatan pendapatan perkapita juga akan meningkatkan jumlah wajib pajak perorangan maupun badan. Struktur perekonomian juga akan meningkatkan penerimaan pajak, seperti bersamaan dengan proses industrialisasi diberbagai bidang sehingga terjadi peningkatan di sektor riil yang kemudian diikuti sektor moneter disamping akan meningkatkan jumlah subyek dan obyek pajak, juga mendukung kemudahan dalam pengumpulan pajak. Keadaan sosial politik sangat mempengaruhi sistem dan tata cara pemungutan pajak yang tentunya akan berpengaruh pada penerimaan pajak.

Sedangkan pengaruh administrasi pajak tercermin dari pelaksanaan administrasi pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Bahkan salah satu tujuan dari reformasi perpajakan yang telah digulirkan sejak tahun 1984 adalah menyederhanakan administrasi perpajakan. Dengan penyederhanaan administrasi

diharapkan pelaksanaan pemungutan pajak akan lebih mudah, efektif, dan efisien sehingga mendorong warga untuk secara sukarela menjadi wajib pajak dan yang sudah menjadi wajib pajak semakin meningkatkan kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- b. Ahmed (1984) sebagaimana diungkapkan kembali oleh Achmad Zamroni (2004) berpendapat bahwa jumlah penerimaan pajak yang dapat dihasilkan sangat bergantung pada tingkat pembangunan ekonomi dan struktur ekonomi yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan potensi untuk penerimaan pajak. Tujuan dari pertumbuhan ekonomi sebagai syarat perlu (*necessary condition*) untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi adalah untuk memberikan standar kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Capaian tingkat pembangunan ekonomi dapat berakibat pada pendapatan per kapita. Dari pertumbuhan ekonomi tersebut sektor industri dan jasa menjadi sangat penting karena kontribusi kedua sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wibowo yang berjudul *Dampak Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Nasional*, yang dimuat Jurnal KIPAS, Vol. 2, Nomor 24, edisi November 2000. Dalam penelitian ini dibahas kaitan antara penerimaan pajak di Indonesia dengan pendapatan nasional (PDB) dari tahun 1969/1970 sampai dengan tahun 1999/2000. Hasil dari penelitian ini membuktikan adanya hubungan antara PDB di Indonesia dengan penerimaan pajak. Dalam bahasannya penelitian ini menjelaskan bahwa penerimaan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan nasional (PDB). Sehingga jika penerimaan pajak meningkat, maka PDB-nya juga akan meningkat, demikian juga sebaliknya.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Camelia Suryana (2005) dalam tesisnya yang berjudul *Analisis Pengaruh Penerimaan Negara dari Sektor Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Dalam penelitiannya

menunjukkan baik penerimaan negara dari pajak dalam negeri secara keseluruhan atau penerimaan negara dari PPh, PPN, dan PBB tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Data yang dipergunakan adalah data variabel bebas pertama berupa penerimaan pajak dalam negeri dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2002 dan data variabel kedua adalah penerimaan negara dari PPh, PPN, dan PBB dengan periode yang sama.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Entang Saefullah (2002) dalam tesisnya yang berjudul *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Hubungannya Dengan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah wajib orang pribadi dan hubungannya dengan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tersebut, variabel bebas yang diteliti adalah faktor tingkat pendidikan, jumlah penghasilan, jumlah penduduk, dan administrasi perpajakan. Sedangkan variabel wajib pajak merupakan variabel antara yang menghubungkan variabel bebas dengan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebagai variabel terikat.

Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa seluruh variabel bebas tersebut secara signifikan berpengaruh positif terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian tersebut juga diperoleh kesimpulan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi jumlah wajib pajak orang pribadi sebesar 73,9%. Sedangkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak orang pribadi.

2.2.2. Tax Ratio

Tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan pendapatan nasional. Rasio dimaksud pada dasarnya menunjukkan jumlah penerimaan pajak yang dapat dipungut dari setiap rupiah pendapatan nasional.

Rasio ini biasa digunakan sebagai salah satu tolok ukur atau indikator untuk melakukan penilaian terhadap kinerja penerimaan pajak. Kenaikan rasio ini bisa mengindikasikan keberhasilan dalam proses pemungutan pajak, karena menunjukkan semakin tingginya nilai rupiah yang dapat dipungut sebagai penerimaan pajak dari setiap rupiah *output* nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zamroni (2004) dalam tesisnya yang berjudul *Kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Periode Tahun 1984-2003*. Pada penelitian ini dilakukan penilaian kinerja penerimaan PPN dan PPn BM Indonesia dengan ukuran *tax ratio*, *tax elasticity*, *tax effort*, dan membandingkannya dengan beberapa negara di ASEAN. Dalam penelitian ini kinerja penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) Indonesia termasuk dalam kategori baik, dimana dalam periode yang diperbandingkan (1984-2003), *tax ratio* PPN terhadap PDB termasuk yang tertinggi setelah Thailand di ASEAN, *index of tax effort* Indonesia merupakan yang tertinggi, serta elastisitas penerimaan PPN terhadap PDB juga menunjukkan tingkat yang tertinggi.

2.2.3. Analisis Index Of Tax Effort

Index of tax effort bertujuan untuk menunjukkan tingkat pemanfaatan kapasitas pajak suatu negara selama suatu kurun waktu tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Zamroni (2004) yang mengutip Cheiliah (1971) bahwa suatu negara dikategorikan mempunyai tingkat pemanfaatan kapasitas pemajakan tinggi apabila *index of tax effort*-nya diatas 1.10, untuk yang tingkat pemanfaatan kapasitas pemajakan sedang apabila *index of tax effort*-nya antara 0.84 sampai dengan 1.10, dan untuk kategori tingkat pemanfaatan kapasitas pemajakan rendah apabila *index of tax effort*-nya dibawah 0.84. *Index of tax effort* adalah merupakan pembagian antara *actual tax ratio* dengan *potential tax ratio*.

Analisis *tax effort* pada dasarnya berasumsi bahwa tingkat penerimaan pajak suatu negara sangat bergantung pada *tax base* atau *tax handles* yang ada di negara tersebut. *Tax handles* ini antara lain tergantung dari tingkat pembangunan ekonomi yang telah dicapai dan struktur ekonomi yang ada.

2.2.4. Konsep Pengelompokan

Dalam Modul II tentang *clustering* Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia, mengungkapkan bahwa analisis pengelompokan merupakan salah satu teknik data mining yang bertujuan untuk mengidentifikasi sekelompok obyek yang mempunyai kemiripan karakteristik tertentu yang dapat dipisahkan dengan kelompok obyek lainnya, sehingga obyek yang berada dalam kelompok yang sama relatif lebih homogen daripada obyek yang berada pada kelompok yang berbeda. Jumlah kelompok yang dapat diidentifikasi tergantung pada banyak dan variasi data obyek.

Sedangkan Johnson dan Wichern (1998) mendefinisikan analisis pengelompokan (*clustering*) adalah sebuah teknik dari analisis multivariabel yang digunakan untuk mengelompokkan objek-objek (variabel atau data) sehingga dapat menghasilkan suatu informasi untuk membantu pelaksanaan pengujian terhadap objek dan pada akhirnya dapat menyajikan suatu hipotesis berdasarkan relasi yang terjadi. Prinsip yang digunakan adalah memaksimalkan homogenitas (kesamaan) dalam satu kelompok dan juga memaksimalkan heterogenitas (ketidaksamaan) antar kelompok.

Adapun manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan pengelompokan yaitu:

- a. Identifikasi hubungan.
Dengan pembentukan kelompok akan terlihat bagaimana suatu objek berkorelasi dengan objek-objek yang lain.
- b. Reduksi data (penyederhanaan data).
Jika objek-objek dikumpulkan dalam satu kelompok, kita dapat memberikan interpretasi secara berkelompok tidak satu-persatu. Dengan demikian akan lebih menghemat waktu dan informasi yang diberikan dapat lebih mudah dipahami.
- c. Profiling (penggolongan tipe objek).
Memberikan deskripsi atau profil keanggotaan dari kelompok.

Analisis pengelompokan dapat diterapkan pada bidang apa saja. Namun pemakaian teknik ini lebih familiar pada bidang pemasaran karena memang salah

satu kegiatan yang dilakukan dalam pemasaran adalah pengelompokan, yang disebut segmentasi pasar. Tujuan analisis pengelompokan di dalam pemasaran adalah sebagai berikut :

a. Membuat Segmen Pasar (*segmenting the market*)

Pelanggan atau pembeli sering dikelompokkan berdasarkan manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari pembelian barang. Setiap kelompok akan terdiri dari pelanggan/pembeli yang relatif homogen, dinyatakan dalam manfaat yang dicari.

b. Memahami Perilaku Pembeli

Analisis pengelompokan digunakan untuk mengenali/mengidentifikasi kelompok pembeli yang homogen/relatif homogen. Kemudian perilaku untuk setiap kelompok perlu dikaji secara terpisah. Pembeli dikelompokkan didasarkan pada *self-reported importance* yang terkait pada setiap faktor pilihan yang digunakan untuk memilih tempat dimana para pembeli membeli barang yang dibutuhkan.

c. Mengenali Peluang Produk Baru

Dengan mengelompokkan merk dan produk, *competitive set* di dalam pasar bisa ditentukan. Merek di dalam kelompok yang sama bersaing sengit satu sama lain, daripada merek dari kelompok lain.

d. Mereduksi data.

Analisis pengelompokan digunakan sebagai suatu alat mereduksi data secara umum, untuk mengembangkan kelompok atau sub-group dari data yang mudah dikelola dari kumpulan data asli, secara individual.

Penelitian yang terkait dengan perpajakan dengan menggunakan metode pengelompokan (*clustering*) dan diskriminan salah satunya adalah yang dilakukan oleh Wahyu Santoso (2006) yang berjudul *Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak* yang dimuat dalam Jurnal Keuangan Publik, Vol. 5 No. 1 edisi Oktober 2008. Dalam penelitian tersebut berhasil mengelompokkan wajib pajak menurut risiko ketidapatuhannya, yaitu risiko bahwa ada pajak yang tidak dibayar karena wajib pajak tidak patuh, sehingga dapat

digunakan untuk memprediksi kecenderungan wajib pajak sesuai dengan risiko ketidapatuhannya. Pengelompokan wajib pajak menurut ketidapatuhannya ini dapat digunakan untuk menentukan pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa berdasarkan tingkat risiko ketidapatuhannya sehingga dapat memperbaiki tingkat efektivitas pemeriksaan pajak.

2.3. Pengelompokan Wajib Pajak oleh DJP

Berkenaan dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja, maka untuk mengetahui potensi perpajakan masing-masing kantor/unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka dilakukan pemetaan sebagai upaya pengelompokan fiskal wajib pajak (WP) yang disesuaikan dengan kondisi atau keunggulan fiskal wilayah kerja masing-masing unit kantor yang bersangkutan.

Dalam melakukan pengelompokan terhadap WP, DJP membagi menjadi beberapa kategori yaitu berdasarkan:

- 1) Wilayah Lokasi/Usaha
yaitu pengelompokan atas wilayah sesuai dengan administrasi pemerintahan (Seperti; Kelurahan/desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi) yang bertujuan untuk mengetahui luas dan struktur wilayah beserta pembagian wilayah berdasarkan batas wilayah pemerintahan beserta jumlah penduduk, wilayah yang dikenakan PBB, jumlah Wajib Pajak terdaftar dan potensi jumlah calon wajib pajak. Pada jenis pengelompokan ini juga dikelompokan wilayah sesuai dengan wilayah ekonomi dengan tujuan untuk mengetahui potensi ekonomi berdasarkan wilayah kegiatan ekonomi seperti lokasi industri, perdagangan, pemukiman mewah, lokasi wisata, lokasi pertambangan, lokasi perkebunan, lokasi pertanian, lokasi kehutanan, lokasi perairan, lokasi pelabuhan/bandara, dan lokasi pergudangan yang ada di lokasi kerja unit kantor yang bersangkutan, yang dapat memberi gambaran potensi penerimaan pajak.

2) Subyek Pajak

Pengelompokan berdasarkan subyek pajak bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dari subjek pajak di wilayah kerjanya, baik yang telah terdaftar maupun yang belum, baik yang berbentuk hukum seperti PT, CV, BUT, maupun yang tidak berbadan hukum. Informasi yang disajikan menyangkut jumlahnya, tingkat kepatuhan, dan ranking berdasarkan peranan penerimaan, tunggakan pajak, dan lain-lain yang bermanfaat untuk menentukan penanganan lebih lanjut terhadap kelompok-kelompok WP yang bersangkutan.

3) Jenis Pajak

Untuk mengetahui gambaran umum *performance* penerimaan per jenis pajak dan pertumbuhannya sehingga dapat memberi petunjuk langkah-langkah penanganan dan pengamanannya.

4) Sektor/Subsektor

Untuk mengetahui gambaran umum *performance* fiskal dari sektor/subsektor di wilayah kerjanya. Informasi yang disajikan dapat berupa *tax ratio*, kepatuhan, pertumbuhan dan sektor dominan, sehingga dapat memberi petunjuk penggalan potensi fiskal.

Berdasarkan kategori pengelompokan WP yang telah dibuat, oleh DJP akan dilakukan analisis agar dapat diketahui potensi perpajakan dan kelompok-kelompok yang terkait dengan potensinya, tingkat risiko serta petunjuk penggalan potensi yang akan dilakukan.

---oo0oo---

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber, yakni dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

Yang dimaksud dengan realisasi total penerimaan pajak per propinsi pada penelitian ini adalah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat yang diperoleh/dikumpulkan dari masing-masing propinsi berkenaan selain perolehan atas sanksi dan denda administrasi. Realisasi total penerimaan pajak tersebut terdiri dari jenis-jenis pajak; pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, bea meterai, dan pajak tidak langsung lainnya. Dari masing-masing jenis pajak tersebut di dalamnya meliputi 28 jenis pajak:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari 12 kelompok
 - Pendapatan PPh Minyak Bumi
 - Pendapatan PPh Gas Alam
 - Pendapatan PPh Migas Lainnya
 - Pendapatan PPh Pasal 21
 - Pendapatan PPh Pasal 22
 - Pendapatan PPh Pasal 22 Impor
 - Pendapatan PPh Pasal 23
 - Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
 - Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan
 - Pendapatan PPh Pasal 26
 - Pendapatan PPh Pasal Final
 - Pendapatan PPh Non Migas Lainnya
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPn BM terdiri dari 6 kelompok
 - Pendapatan PPN Dalam Negeri
 - Pendapatan PPN Impor
 - Pendapatan PPN Lainnya
 - Pendapatan PPn BM Dalam Negeri
 - Pendapatan PPn BM Impor
 - Pendapatan PPn BM Lainnya

- 3) Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari 6 kelompok
 - Pendapatan PBB Pedesaan
 - Pendapatan PBB Perkotaan
 - Pendapatan PBB Perhutanan
 - Pendapatan PBB Perkebunan
 - Pendapatan PBB Pertambangan
 - Pendapatan PBB Lainnya
 - Pendapatan BPHTB
- 4) Bea Meterai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya terdiri dari 3 kelompok
 - Pendapatan Bea Meterai
 - Pendapatan dari Penjualan Bea Meterai
 - Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)

Tabel 3.1
Variabel Data

VARIABEL	SATUAN	SUMBER
Penerimaan Pajak	Rupiah	DJP/DJPN
Jumlah penduduk	Jiwa	BPS
PDRB	Rupiah	BPS
Industri	Rupiah	BPS
Luas Wilayah	KM ²	Ditjen. PUM
APBD	Rupiah	Ditjen PK
DIPA	Rupiah	Perpres
Jumlah Karyawan	Jiwa	BPS

Variabel-variabel yang digunakan untuk melakukan analisis adalah realisasi penerimaan pajak yang bersumber dari bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008. Data ini diperoleh dari Sistem Informasi Perpajak (SIP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disesuaikan dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

Sedangkan variabel-variabel lainnya adalah variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak, yang datanya bersumber dari: Badan Pusat Statistik (BPS), Peraturan Presiden Tentang Rincian Anggaran Tahun 2008

(Perpres No. 105 Tahun 2007), Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan. Variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak tersebut adalah; jumlah penduduk, Jumlah Karyawan Tetap, Luas Wilayah Daratan, PDRB, Industri, APBD, dan DIPA. Variabel-variabel tersebut adalah:

- Jumlah penduduk merupakan populasi penduduk yang mendiami suatu propinsi. Data ini merupakan data proyeksi jumlah penduduk tahun 2008 dengan satuan jiwa. Data ini berasal dari BPS. Jumlah penduduk dijadikan sebagai variabel dalam analisis ini karena diasumsikan dengan semakin banyak jumlah penduduk, maka potensi wajib pajak dan calon wajib pajak pada propinsi tersebut semakin besar.
- Variabel jumlah karyawan tetap merupakan jumlah karyawan tetap yang terdapat dalam suatu propinsi pada periode tahun yang dianalisis yaitu tahun 2008. Variabel ini merupakan potensi jumlah wajib pajak PPh Pasal 21. Semakin banyak WP PPh Pasal 21 diharapkan semakin besar jumlah penerimaan pajak PPh Pasal 21.
- PDRB merupakan data pendapatan propinsi yang menggambarkan kemampuan propinsi untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Data PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku dengan satuan rupiah. Sumber data yang berasal dari BPS ini merupakan PDRB yang dihasilkan tahun 2007 dengan satuan rupiah. Pemilihan data tahun 2007 yang digunakan, mengingat sampai dengan penyusunan tesis ini untuk tahun 2008 data tersebut belum terbit. Variabel PDRB merupakan potensi penerimaan pajak penghasilan baik PPh Orang Pribadi, maupun PPh Badan serta potensi PPN.
- Variabel industri merupakan produk manufaktur yang dihasilkan oleh suatu wilayah propinsi baik industri migas maupun industri non-migas pada kurun waktu tertentu. Variabel industri diperoleh dari BPS dan merupakan industri yang dihasilkan tahun 2007 dengan satuan rupiah. Variabel ini merupakan potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada propinsi berkenaan.
- Variabel APBD dengan satuan rupiah, merupakan penjumlahan kumulatif dari seluruh APBD kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah propinsi

ditambah dengan APBD propinsi berkenaan untuk tahun anggaran 2008 yang sumber datanya diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen keuangan. Nilai APBD yang ditampilkan adalah anggaran pengeluaran/belanja daerah tahun 2008. Dari data APBD ini diasumsikan adanya potensi pajak yang disumbang oleh APBD yang merupakan pengeluaran pemerintah (*government expenditure/G*).

- Data luas wilayah dengan satuan KM², merupakan wilayah yang menjadi pengelolaan/kekuasaan suatu propinsi. Data luas wilayah yang dijadikan variabel dalam penelitian ini adalah luas wilayah daratan, dengan asumsi potensi penerimaan PBB hampir diseluruh wilayah sebagian besar dasar perhitungannya dari luas wilayah daratan. Luas wilayah juga merupakan gambaran wilayah yang harus tangani, hal ini berkenaan dengan semakin luas wilayah yang harus ditangani maka semakin membutuhkan usaha yang lebih ekstra. Data luas wilayah bersumber dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri.
- DIPA merupakan anggaran yang dialokasikan pada tahun anggaran tertentu untuk melakukan pemungutan pajak atau ini merupakan *effort* internal dari DJP dalam usaha pengumpulan pajak. Alokasi anggaran ini diperoleh dari Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2007 tentang Rincian Anggaran Tahun 2008. Data ini merupakan gabungan alokasi anggaran dari kantor-kantor vertikal DJP yang berada dalam suatu propinsi diluar belanja modal. Pada variabel ini selain merupakan cerminan upaya penggunaan sumber daya berupa dana untuk pengadaan sarana dan prasarana, juga tercermin upaya penggunaan sumber daya manusia, karena dalam DIPA tersebut terdapat pembayaran biaya gaji pegawai yang terlibat di dalamnya.

3.2. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

Karena yang menjadi obyek penelitian ini adalah wilayah propinsi berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan pajaknya, maka untuk itu perlu terlebih dahulu dibuat segmentasi. Segmentasi ini merupakan pengelompokan propinsi kedalam kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik yang ada pada propinsi tersebut. Segmentasi berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan variabel yang dapat mempengaruhi

penerimaan pajaknya diperlukan supaya dapat dilakukan penanganan yang sesuai antara masing-masing segmen untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam setiap upaya peningkatan penerimaan pajak.

Untuk membuat segmentasi itu, diperlukan adanya satu metode yang dapat mengelompokkan propinsi-propinsi tersebut berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan pajaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model statistik *Multivariate Cluster Analysis*.

Namun sebelum melakukan analisis dan pengujian dengan kedua metode tersebut, terlebih dahulu akan dilakukan analisis deskriptif terhadap beberapa jenis penerimaan pajak. Beberapa jenis pajak yang akan dideskripsikan adalah: PPh Migas, PPh Pasal 21, PPh Orang Pribadi, PPh Badan, PPN dan PPn Barang Mewah, serta PBB dan BPHTB. Dari analisis deskriptif ini akan diperoleh gambaran penerimaan pajak menurut jenis pajak, kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap keseluruhan penerimaan pajak, sebaran penerimaan jenis pajak tersebut pada masing-masing propinsi, dan kontribusi masing-masing propinsi terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan.

Deskripsi juga dilakukan terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yaitu: Jumlah Penduduk, Jumlah Karyawan Tetap, Luas Wilayah Daratan, PDRB, Industri, APBD, dan DIPA. Dari analisis variabel-variabel ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran variabel tersebut pada masing-masing propinsi. Pada akhirnya berdasarkan analisis deskriptif terhadap penerimaan pajak ini akan dilakukan pengujian dan dianalisis terhadap total penerimaan pajak dengan variabel yang mempengaruhinya pada suatu propinsi dengan menggunakan dua metode statistik yaitu Regresi dan *Multivariate Cluster Analysis*.

Model statistik *Multivariate Cluster Analysis* digunakan untuk membuat pengelompokan obyek-obyek menurut kesamaan karakteristik diantara propinsi atas dasar realisasi total penerimaan pajak terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak. Realisasi total penerimaan pajak per propinsi tersebut merupakan pajak yang dipungut dan menjadi hak pemerintah pusat yang

diperoleh/dikumpulkan dari masing-masing propinsi berkenaan.

Untuk memudahkan analisis data dalam penelitian ini digunakan *software* SPSS. Adapun langkah pelaksanaan analisis menggunakan *software* tersebut berturut-turut diuraikan berdasarkan metodologi sebagai berikut:

- Regresi
- Multivariate Cluster Analysis

3.3. Regresi

Analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan, dimana dalam model tersebut ada sebuah variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*). Dalam penelitian ini dilakukan regresi linier terhadap variabel-variabel sebagai berikut: *tax ratio* regional, Jumlah Penduduk, Jumlah Karyawan Tetap, Luas Wilayah Daratan, PDRB, Industri, APBD, dan DIPA. Dari variabel-variabel tersebut variabel *tax ratio* regional merupakan variabel terikat, sedangkan variabel lainnya merupakan variabel bebas.

Dengan analisis regresi dalam penelitian ini lebih diarahkan pada harapan akan diperolehnya nilai prediksi dan nilai residual. Nilai prediksi merupakan *tax ratio* regional yang seharusnya (potensial) dicapai oleh suatu propinsi. Sedangkan nilai residual merupakan selisih *tax ratio* regional aktual dan *tax ratio* regional yang seharusnya. *Tax ratio* regional aktual diperoleh dari penerimaan pajak total pada suatu propinsi dibagi dengan PDRB yang dihasilkan propinsi tersebut.

Pada bagian akhir pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi akan dilakukan penelitian sehingga diperoleh kesimpulan tentang variabel mana saja dari tujuh variabel sebagaimana dikemukakan di atas yang berpengaruh terhadap *tax ratio* regional.

3.4. Multivariate Cluster Analysis.

Analisis pengelompokan atau *Cluster analysis* adalah suatu teknik dari analisis multivariabel yang ditujukan untuk membuat klasifikasi objek-objek (variabel atau data) kedalam kelompok-kelompok yang berbeda antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat menghasilkan suatu informasi untuk membantu pelaksanaan pengujian terhadap objek dan pada akhirnya dapat menyajikan suatu

hipotesis berdasarkan relasi yang terjadi. Prinsip yang digunakan adalah memaksimalkan homogenitas (kesamaan) dalam satu kelompok dan juga memaksimalkan heterogenitas (ketidaksamaan) antar kelompok.

Adapun ciri-ciri pengelompokan adalah:

- Homogenitas (kesamaan) yang tinggi antar anggota dalam satu kelompok (*within-cluster*).
- Heterogenitas (perbedaan) yang tinggi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya (*between-cluster*).

Analisis pengelompokan mempunyai beberapa istilah penting, antara lain:

- 1) Skedul aglomerasi (*agglomeration schedule*), memberikan informasi tentang objek atau kasus yang akan dikelompokkan pada setiap tahap pada suatu proses analisis pengelompokan yang hierarkis.
- 2) Rata-rata kelompok (*cluster centroid*), ialah nilai rata-rata variabel dari semua objek atau observasi dalam kelompok tertentu.
- 3) Pusat kelompok ialah titik awal dimulainya pengelompokan di dalam kelompok nonhierarki.
- 4) Keanggotaan kelompok (*cluster membership*), ialah keanggotaan yang menunjukkan kelompok untuk setiap objek yang menjadi anggotanya.
- 5) Dendogram, disebut juga grafik pohon, output SPSS yang memvisualisasikan hasil analisis cluster yang dilakukan peneliti. Garis vertikal atau tegak menunjukkan kelompok yang digabung bersama. Posisi garis pada pada skala menunjukkan jarak untuk mana kelompok digabung.
- 6) *Distances between cluster centers*, ialah jarak yang menunjukkan bagaimana terpisahnya pasangan individu kelompok (Supranto, 2004).

Setelah menguraikan secara umum tentang teori *Multivariate Cluster Analysis*, maka berkenaan dengan data yang dianalisis, dari rasio-rasio yang telah terbentuk tadi kemudian diuji dengan menggunakan model statistik *Multivariate Cluster Analysis* yang digunakan untuk membuat pengelompokan obyek-obyek menurut kesamaan karakteristik diantara propinsi. Dengan metode ini, dari variabel data yang diolah akan terbentuk kelompok-kelompok propinsi. Dari

kelompok propinsi ini akan diketahui kedekatan masing-masing propinsi dengan propinsi lainnya yang paling berdekatan karakteristiknya berupa rasio realisasi penerimaan pajaknya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam analisis pengelompokan terdapat dua metode utama yaitu Metode Hirarki dan Metode Non-Hirarki. Metode Hirarki memulai pengelompokan dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian operasi diteruskan ke objek lain yang mempunyai kedekatan kedua. Demikian seterusnya sehingga kelompok akan membentuk semacam “pohon/tree” dimana ada hirarki (tingkatan) yang jelas antar objek, dari yang paling mirip sampai paling tidak mirip. Sedangkan Metode Non-Hirarki dimulai dengan proses penentuan jumlah kelompok terlebih dahulu.

Metode pengelompokan yang digunakan untuk pengujian dalam penelitian ini dengan Metode Non-Hirarki yang digunakan adalah K-Means. Proses Pengelompokan dengan Metode K-Means adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan besarnya k , yaitu banyaknya kelompok dan menentukan *centroid* di tiap kelompok.
- 2) Menghitung jarak tiap objek dengan setiap *centroid*.
- 3) Menghitung kembali rata-rata (*centroid*) untuk kelompok yang baru terbentuk.
- 4) Mengulangi langkah 2 sampai tidak ada lagi pemindahan objek antar kelompok (Sartono, 2004).
- 5) Setelah kelompok terbentuk, langkah selanjutnya melakukan interpretasi terhadap kelompok yang terbentuk, yang pada intinya memberi nama spesifik untuk menggambarkan isi kelompok tersebut.
- 6) Melakukan validasi kelompok.

Untuk menguji validasi kelompok digunakan uji parsial F.

---oo0oo---

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Umum

Pada bab ini merupakan hasil pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara deskriptif, regresi dan pengelompokan terhadap penerimaan pajak per propinsi dan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Analisis deskriptif menjelaskan total penerimaan pajak per propinsi yang kemudian dijabarkan menurut jenis pajak: PPh Migas, PPh Pasal 21, PPh Orang Pribadi, PPh Badan, PPN dan PPn BM, PBB dan BPHTB, serta Meterai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Selain mendeskripsikan penerimaan pajak, dideskripsikan juga variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak pada suatu propinsi yaitu; jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB, Industri yang dihasilkan, jumlah karyawan tetap, DIPA, dan APBD dalam suatu propinsi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui *tax ratio* regional yang dihasilkan masing-masing propinsi dan potensi *tax ratio* regional yang seharusnya dihasilkan propinsi tersebut. Kemudian dibandingkan antara *tax ratio* yang dihasilkan dengan *tax ratio* regional yang seharusnya sehingga diperoleh propinsi-propinsi yang *tax ratio* regionalnya diatas atau dibawah *tax ratio* regional yang seharusnya dicapai. Selanjutnya dicari variabel yang secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak. Kemudian, analisis pengelompokan digunakan untuk membentuk kelompok propinsi menurut variabel-variabel yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

4.2. Hasil Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan terhadap penerimaan pajak dan variabel-variabel yang diasumsikan dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Pada analisis deskriptif terhadap penerimaan pajak, terlebih dahulu diuraikan penerimaan pajak menurut jenis pajaknya. Setelah itu dideskripsikan variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak.

4.2.1. Deskripsi Penerimaan Pajak

Analisis deskriptif dilakukan terhadap penerimaan pajak menurut jenis pajak untuk seluruh propinsi. Data penerimaan pajak propinsi yang dianalisis

tidak seluruhnya dijadikan sebagai bahan pengujian. Sebagai contoh perolehan pajak dari Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar (Kanwil *Large Taxpayers Office/LTO*) yang berada di Propinsi DKI Jakarta tidak dimasukkan sebagai data penerimaan pajak propinsi tersebut dalam pengujian. Penerimaan pajak yang deskripsikan adalah jenis pajak PPh Migas, PPh Pasal 21, PPh Orang Pribadi, PPh Badan, PPN dan PPn BM, PBB dan BPHTB, serta Meterai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Sedangkan jenis pajak lainnya tidak dideskripsikan seperti PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Non-Migas lainnya, PPh Fiskal Luar Negeri, PPN lainnya dan Bunga Penagihan Pajak.

Berdasarkan data yang diolah dapat dideskripsikan bahwa tingkat penerimaan pajak antar propinsi sangat tidak merata, dimana antara penerimaan pajak yang paling sedikit dengan yang paling banyak cukup jauh perbedaannya. Kondisi ini menunjukkan terdapat propinsi yang penerimaan pajaknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penerimaan propinsi-propinsi lainnya. Khususnya untuk penerimaan pajak dengan jenis pajak PPh Pasal 21, PPh Badan, dan PPN-PPn BM.

Dalam analisis deskriptif berikut diuraikan tujuh kelompok jenis pajak, yaitu PPh Migas, PPh Pasal 21, PPh Orang Pribadi, PPh Badan, PPN dan PPn BM, PBB dan BPHTB, serta penerimaan Bea Meterai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) untuk penerimaan pajak tahun 2008:

4.2.1.1. PPh Migas

Pada Tabel 4.1. penerimaan PPh Migas menunjukkan bahwa untuk seluruh propinsi yang berjumlah 33, terdapat propinsi yang penerimaan PPh Migasnya nihil dan penerimaan PPh Migas tertinggi senilai Rp285 milyar dengan rata-rata penerimaan pajak PPh Migas per propinsi sebesar Rp11,73 milyar. Berdasarkan data penerimaan pajak, maka akan tampak propinsi yang penerimaan PPh Migasnya nihil adalah Propinsi Banten, sedangkan yang tertinggi adalah Propinsi DKI Jakarta. Propinsi DKI Jakarta penerimaan PPh Migasnya tertinggi karena hampir seluruh perusahaan pertambangan migas berkedudukan di DKI Jakarta, kecuali perusahaan pertambangan migas yang berbentuk BUMN walaupun berkedudukan di DKI Jakarta pelayanan pajaknya ditangani Kanwil LTO yang

dikecualikan dalam penelitian ini. Perlu juga diketahui bahwa penerimaan PPh Migas tidak seluruhnya dapat teralokasi kepada masing-masing propinsi, hal ini terjadi karena terdapat perhitungan, pembayaran, dan penyetoran pajaknya dilakukan di tingkat pemerintah pusat yang mencapai Rp29.634,97 milyar atau 38,16% dari total atau dengan kata lain KPP setempat tidak melakukan pencatatan atas penerimaan pajak ini. Dengan adanya perhitungan PPh Migas yang disetor di tingkat pusat, maka bila dilihat pada Tabel 4.2a. urutan kedua dan ketiga terbesar penerimaan pajak PPh Migas adalah Sumatera Barat dan Sumatera Utara dengan masing-masing penerimaan pajaknya sebesar Rp39,5 milyar dan Rp34,59 milyar. Hal ini kurang sesuai dengan kondisi sesungguhnya dimana Propinsi Riau dan Kalimantan Timur seharusnya termasuk dalam urutan tiga terbesar karena kontribusi kedua propinsi ini dalam penerimaan migas secara nasional merupakan yang terbesar.

4.2.1.2. PPh Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan jenis pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Definisi penghasilan disini termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, bonus, tunjangan tahun baru, dan penghasilan sejenis lainnya. PPh Pasal 21 juga merupakan salah satu jenis pajak pemotongan dan pemungutan (*withholding tax*) yang dikenakan kepada subyek pajak karyawan atau pegawai yang bekerja pada suatu lembaga/organisasi yang pengenaannya dilakukan dengan pemotongan gaji/upah oleh bendaharawan/juru bayar gaji/upah dari organisasi/lembaga tersebut untuk kemudian disetorkan oleh pemungut/pemotong ke rekening kas negara. Pada Tabel 4.1. penerimaan PPh Pasal 21 tidak ada yang nihil, yang berarti di seluruh propinsi terdapat pegawai/karyawan yang memperoleh upah/gaji. Hal ini sejalan dengan keadaan yang sesungguhnya bahwa setidaknya pada masing-masing propinsi terdapat pegawai pemerintah daerah. Propinsi yang perolehan PPh Pasal 21-nya paling rendah dengan nilai sebesar Rp29,77 milyar adalah Propinsi Sulawesi Barat sedangkan yang tertinggi adalah sebesar Rp15.435,32 milyar yaitu penerimaan

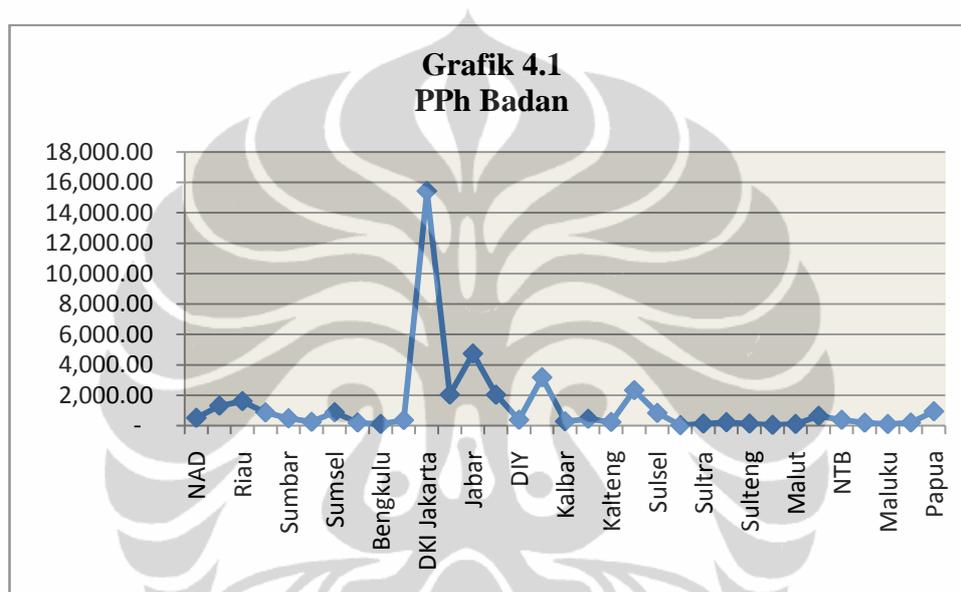
pada Propinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta sebagai daerah dengan penerimaan PPh Pasal 21-nya yang paling banyak mengindikasikan bahwa di propinsi ini baik jumlah pegawai maupun nilai penghasilan yang diperoleh pegawainya paling tinggi diantara propinsi yang lain. Selain itu, struktur perekonomian propinsi ini juga sangat didominasi oleh sektor sekunder dan tertier, dimana menurut data perkembangan PPh Non-Migas sektoral sebagaimana diungkapkan dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2010, tingkat kontribusi kedua sektor ini pada tahun 2008 terhadap penerimaan pajak PPh Non-Migas mencapai angka sebesar 82,60%. Sedangkan Propinsi Sulawesi Barat dengan penerimaan terkecil cukup beralasan karena selain merupakan daerah pemekaran baru juga struktur perekonomiannya masih dominan pada sektor pertanian, dimana sesuai dengan perkembangan PPh Non-Migas sektoral sebagaimana diungkapkan dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2010, bahwa gabungan dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar 4,3% terhadap total penerimaan PPh Non Migas. Kontribusi sektor ini pada tahun-tahun sebelumnya masing-masing hanya 2,6%, 2,0% dan 2,1%.

Dari data ini juga tampak bahwa terdapat kesenjangan penerimaan pajak PPh Pasal 21 karena antara yang terendah dan tertinggi sangat jauh berbeda yaitu sekitar Rp15.400 milyar. Kemudian bila dirata-ratakan penerimaan jenis pajak ini adalah Rp1.266 milyar per propinsi.

4.2.1.3. PPh Orang Pribadi

Total penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) untuk seluruh propinsi mencapai Rp3.628,39 milyar. Berdasarkan tabel 4.1. ini tampak bahwa terdapat penerimaan yang terendah sebesar Rp0,27 milyar dan penerimaan tertinggi adalah Rp1.914,52 milyar. Nilai penerimaan yang terkecil adalah yang diperoleh Propinsi Sulawesi Barat. Sedang yang tertinggi adalah Propinsi DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa di DKI Jakarta selain paling banyak wajib pajak orang pribadi-nya juga dalam kenyataan penghasilan subyek pajak (wajib pajak) PPh OP-nya juga paling tinggi bila dibandingkan dengan propinsi lainnya. Wajib pajak PPh OP adalah para profesioanl, seperti pengacara, dokter, akuntan, dan para pedagang yang belum berbadan hukum. Analisis penerimaan PPh OP

bila dilihat dari karakteristik wajib pajaknya dan struktur perekonomian Propinsi DKI Jakarta yang dominan pada sektor sekunder dan tertier, serta sangat minim pada sektor primer, tidak berbeda dengan ketika dilakukan analisis atas penerimaan PPh Pasal 21. Dengan demikian Propinsi DKI Jakarta sebagai penerima pajak PPh OP yang tertinggi dengan nilai sebesar Rp1.914,52 milyar, atau 52,77% dari seluruh penerimaan PPh OP adalah merupakan hal yang semestinya terjadi.



4.2.1.4. PPh Badan

Penerimaan PPh Badan yang merupakan pajak terhadap subyek pajak badan secara nasional mencapai Rp105.762,32 milyar. Nilai ini termasuk penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh Kanwil LTO yang mencapai Rp69.164,23 milyar atau 65,40%-nya. Ini juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak PPh Badan disumbang oleh perusahaan-perusahaan besar –sekitar 3.000 WP- yang dilayani oleh KPP WP Besar.

Kemudian berdasarkan tabel dapat diterangkan bahwa penerimaan PPh Badan yang tertinggi senilai Rp25.729 milyar. Angka ini dibukukan oleh Propinsi DKI Jakarta. Disisi lain terdapat propinsi yang dalam tabel realisasi penerimaan PPh Badan-nya dibawah angka satu milyar, yaitu Rp0,85 milyar atau tepatnya Rp848.099.711,00 yaitu Propinsi Sulawesi Barat. Penerimaan PPh Badan di

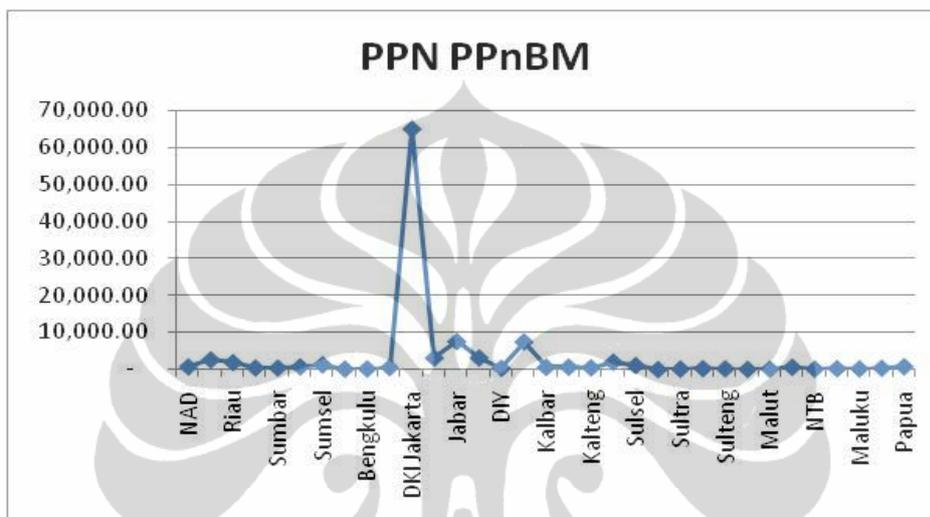
Propinsi DKI Jakarta tetap merupakan yang tertinggi walaupun data penerimaan dari Kanwil Wajib Pajak Besar (LTO) yang berada di Jakarta sudah dikeluarkan dalam analisis ini. Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta mempunyai jumlah wajib pajak PPh Badan yang paling banyak, serta omset dan laba perusahaan-perusahaan yang menjadi wajib pajak PPh Badan di DKI Jakarta juga tinggi. Sedangkan Propinsi Sulawesi Barat adalah kondisi sebaliknya, hal ini sesuai dengan keadaan bahwa Sulawesi Barat selain merupakan propinsi baru, juga kondisi perekonomiannya lebih banyak di sektor pertanian yang belum banyak dikenakan pajak. Selain sebagaimana telah dikemukakan pada analisis penerimaan PPh Pasal 21 dan penerimaan PPh Orang Pribadi yang didasarkan pada perbedaan struktur perekonomian kedua propinsi ini, pada kenyataannya dalam upaya pelayanan dan pemungutan pajaknya juga jauh berbeda, dimana pada Propinsi Sulawesi Barat baru dibentuk satu KPP beserta satu Kantor Bantunya yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Bandingkan dengan Propinsi DKI Jakarta yang sampai dengan akhir tahun 2008 telah memiliki tujuh Kantor Wilayah termasuk Kanwil LTO dan Kanwil Jakarta Khusus dengan tidak kurang dari 69 Kantor Pelayanan Pajak. Perbedaan upaya pelayanan ini tentunya berpengaruh juga terhadap hasil penerimaan pajaknya. Disisi lain pelayanan perpajakan juga disesuaikan dengan volume wajib pajak dan karakteristik perpajakan yang harus dilayaninya.

4.2.1.5. PPN dan PPn Barang Mewah

Penerimaan pajak jenis ini mempunyai jarak yang jauh antara propinsi penerima pajak tertinggi dengan propinsi penerima pajak terendah. Penerimaan pajak yang tertinggi sebesar Rp65.132,39 milyar merupakan penerimaan pajak pada Propinsi DKI Jakarta, sedangkan yang terendah dengan nilai Rp45,39 milyar merupakan penerimaan Propinsi Sulawesi Barat. Kondisi penerimaan PPN dan PPn Barang Mewah (PPn BM) mirip dengan penerimaan PPh Badan, dimana terjadi penerimaan yang terbesar dan terkecil adalah antara DKI Jakarta dan Sulawesi Barat. Hal ini beralasan karena selain sebagaimana telah diungkapkan dalam analisis penerimaan ketiga jenis pajak penghasilan di atas, juga karena PPN dan PPn BM merupakan pajak atas nilai tambah (*added value*) barang/jasa dan

pajak atas penjualan barang mewah, dimana produsen yang menghasilkan nilai tambah barang/jasa, penjualan barang mewah, dan kegiatan importasi merupakan kegiatan utama perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan yang sebagian besar berada di kota-kota besar dan daerah industri seperti Propinsi DKI Jakarta.

Grafik 4.2



Komparasi penerimaan PPN dan PPn BM antar propinsi juga dapat dilakukan dengan melihat data perkembangan PPN dalam negeri secara sektoral. Menurut Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2009 kontribusi terbesar terhadap PPN dan PPn BM disumbang dari sektor industri pengolahan yang pada tahun 2008 mencapai sebesar 29,8%. Sektor industri pengolahan didalamnya meliputi industri pengolahan makanan dan minuman, tembakau, kimia, barang galian bukan logam, dan industri pengolahan lainnya. Setelah itu kontribusi terbesar kedua dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,7%, kemudian disusul sektor pertambangan migas 14,2%. Sehingga pada akhirnya dapat dipastikan bahwa daerah yang mempunyai keunggulan di sektor tersebut penerimaan PPN dan PPn BM-nya akan lebih tinggi. Karakteristik perekonomian sektor tersebut pada umumnya berada di perkotaan dan daerah industri.

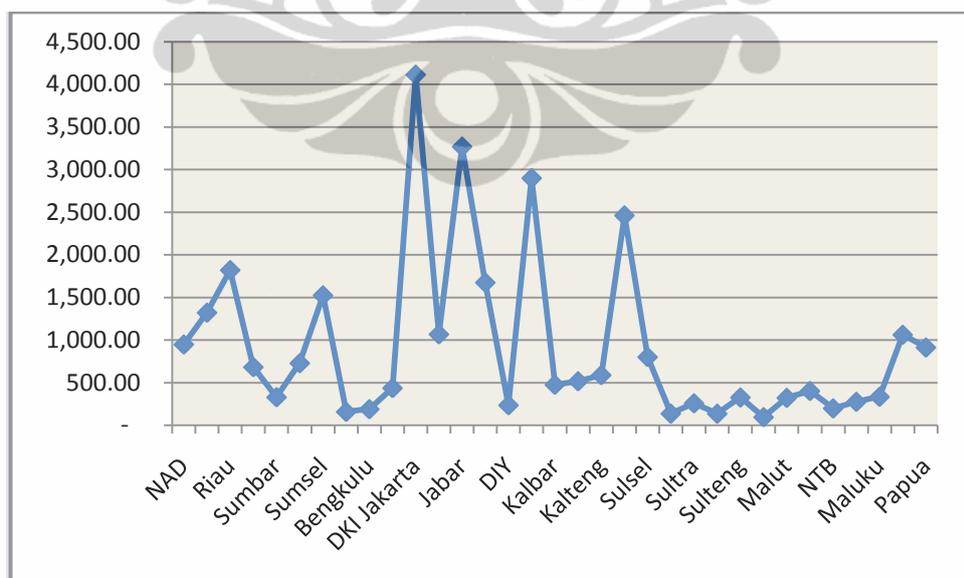
Secara keseluruhan penerimaan PPN dan PPn BM merupakan penerimaan pajak yang terbesar setelah penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan yang didalamnya termasuk PPh Migas. Dimana penerimaan PPN dan PPn BM

mencapai 36,92% dari total penerimaan pajak, sedangkan penerimaan PPh keseluruhan 41,73%. Pada penerimaan PPN dan PPn BM juga sebagian besar dikumpulkan oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (LTO) yaitu sebesar Rp104.431,74 milyar dari keseluruhan penerimaan PPN dan PPn BM se Indonesia yang mencapai Rp211.082,66 milyar atau sebesar 49,47%.

4.2.1.6. PBB dan BPHTB

Kondisi penerimaan PBB dan BPHTB menarik untuk dicermati, bahwa yang terendah penerimaannya adalah sebesar Rp94 milyar, sedangkan yang tertinggi Rp4.113 milyar. Ternyata angka ini merupakan penerimaan dari Propinsi Gorontalo dan Propinsi DKI Jakarta. Kedua wilayah ini merupakan propinsi yang luas wilayahnya relatif kecil dibandingkan dengan propinsi-propinsi yang lain, bahkan DKI Jakarta merupakan yang paling sedikit luas wilayahnya, namun DKI Jakarta mampu memungut penerimaan pajak jenis ini yang terbesar secara nasional atau 13,42%. Bandingkan dengan luas wilayah DKI Jakarta yang luas daratannya 664,01 KM² atau 0,035% dari seluruh luas daratan seluruh propinsi.

Grafik 4.3
Penerimaan PBB



Hal ini terjadi karena dasar pengenaan PBB selain memperhitungkan luas yang menjadi obyek pajak juga yang jauh lebih besar kontribusinya adalah harga

jualnya atau lebih dikenal dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Semakin besar NJOP-nya semakin besar dasar pengenaan pajaknya. Hal ini menjadi alasan kenapa di DKI Jakarta penerimaan PBB dan BPHTB-nya tertinggi walaupun luas wilayahnya tersempit. Faktor lainnya sebagai penyumbang penerimaan PBB dan BPHTB di DKI Jakarta adalah adanya transaksi jual beli tanah dan bangunan. Ini tampak dari realisasi penerimaan BPHTB di DKI Jakarta yang mencapai sebesar Rp1.951,41 milyar atau sebesar 35,66% dari penerimaan BPHTB nasional.

Karakteristik penerimaan PBB dan BPHTB di DKI Jakarta sebagai daerah perkotaan akan sama dengan penerimaan PBB dan BPHTB di kota-kota lain. Sedangkan untuk wilayah non perkotaan, seperti pedesaan dan perhutanan tentu karakteristik penerimaan PBB dan BPHTB-nya berlainan, karena dasar pengenaan pajak dan tarif yang diberlakukan di wilayah pedesaan berbeda dengan wilayah kehutanan. Berbeda lagi dengan wilayah yang mempunyai pertambangan, baik migas maupun non migas. Dari segi penerimaan BPHTB-nya pun akan berbeda, dimana biasanya di wilayah perkotaan, perputaran kepemilikan lahan dan bangunan relatif lebih cepat dibandingkan dengan wilayah pedesaan yang relatif stabil atau tidak sering berganti kepemilikan.

4.2.1.7. Bea Meterai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya

Penerimaan Bea Meterai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) secara nasional mencapai Rp1.864,93 milyar dengan penerimaan tertinggi di Jawa Barat sebesar Rp329,25 milyar dan terkecil di Sulawesi Barat sebesar Rp1 milyar. Penerimaan jenis pajak ini didominasi oleh penerimaan Bea Meterai yang merupakan pungutan pajak dalam rangka pemberian jaminan legalitas atas suatu transaksi bisnis, surat perjanjian, nota kesepahaman, surat kepemilikan, dan lain-lain.

4.2.1.8. Kesimpulan Penerimaan Pajak

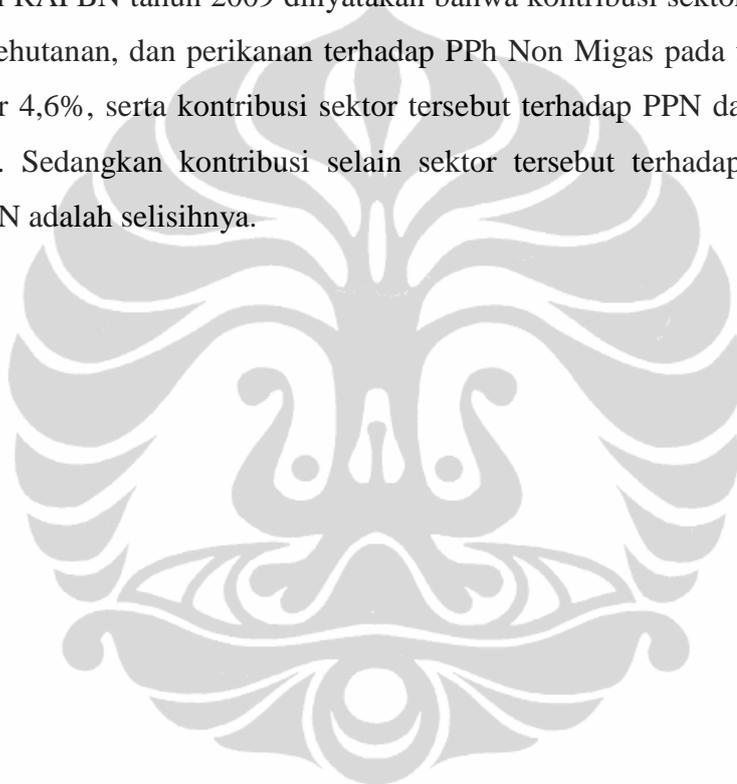
Secara umum, Propinsi DKI Jakarta menempati urutan tertinggi dalam setiap jenis penerimaan pajak, kecuali untuk penerimaan Bea Meterai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) yang realisasi tertingginya terjadi di Propinsi Jawa Barat. Propinsi DKI Jakarta tertinggi di hampir seluruh jenis pajak, hal ini

sejalan dengan kontribusi penerimaan pajak DKI Jakarta yang secara keseluruhan mencapai 24,55% atau hampir seperempat penerimaan pajak diperoleh di DKI Jakarta. Hal ini juga menunjukkan gambaran bahwa kinerja penerimaan pajak di DKI Jakarta paling baik untuk seluruh jenis pajak dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain. Sedangkan Jawa Barat sebagai penerima tertinggi jenis pajak Bea Meterai dan PTLT memang cukup beralasan karena PT. Pos Indonesia sebagai penyalur tunggal benda meterai dan yang sejenisnya berkantor pusat di Bandung, dimana administrasi perpajakannya tentunya berada di wilayah ini.

Pada sisi lain, propinsi yang selalu menjadi urutan terbawah untuk seluruh jenis penerimaan pajaknya adalah Propinsi Sulawesi Barat, kecuali penerimaan PBB dan PPh Migas, ditempati Propinsi Gorontalo. Kondisi Propinsi Sulawesi Barat juga beralasan, karena selain merupakan propinsi bentukan baru, struktur perekonomiannya juga masih lebih terkonsentrasi di sektor primer, khususnya bidang pertanian yang belum banyak dikenakan pajak. Faktor lainnya adalah belum memadainya sarana dan prasarana pemungutan pajak, dimana untuk satu propinsi hanya ada satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan satu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). KP2KP merupakan kantor bantu KPP.

Sebagai penjelasan lebih konkrit tampak pada Tabel 4.1 yang menunjukkan bahwa Pulau Jawa merupakan pulau yang memberikan kontribusi sumbangan tertinggi terhadap penerimaan pajak, hal ini tampak dari Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah yang selalu berada dalam posisi tiga besar pada setiap jenis penerimaan pajak. Sedangkan Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku merupakan pulau yang memberikan kontribusi terendah terhadap penerimaan pajak, kecuali wilayah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan merupakan pengecualian karena pada wilayah ini sudah mulai terjadi industrialisasi dan sedang diproyeksikan untuk dijadikan pusat perekonomian untuk Wilayah Indonesia Timur. Untuk propinsi-propinsi yang berada di pulau Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya dapat disimpulkan bahwa mereka berada pada level menengah penerimaan pajak, kecuali untuk Propinsi Papua Barat berada pada posisi ketiga terbawah untuk jenis pajak Meterai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi di Pulau Jawa yang struktur perekonomiannya tidak lagi hanya bertumpu pada sektor pertanian, akan tetapi sudah bertumpu pada sektor manufaktur dan jasa. Kondisi sebaliknya struktur perekonomian di Pulau Sulawesi dan Maluku, dimana sektor pertanian dan pertambangan masih sangat dominan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sektor pertanian belum memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak karena sektor ini lebih banyak yang belum dikenakan pajak. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2009 dinyatakan bahwa kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan terhadap PPh Non Migas pada tahun 2008 adalah sebesar 4,6%, serta kontribusi sektor tersebut terhadap PPN dalam negeri sebesar 3,5%. Sedangkan kontribusi selain sektor tersebut terhadap PPh Non Migas dan PPN adalah selisihnya.



Tabel 4.1.

4.2.2. Deskripsi Variabel Potensi Penerimaan Pajak

Pada paparan ini merupakan deskripsi atas variabel-variabel yang merupakan variabel yang dapat mempengaruhi potensi penerimaan pajak dalam suatu wilayah propinsi. Paparan yang disajikan merupakan gambaran dari masing-masing variabel mengenai jumlah minimum dan maksimum dikaitkan dengan realisasi penerimaan pajak pada propinsi berkenaan.

4.2.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2008 mencapai 230,16 juta jiwa. Dari jumlah tersebut tersebar di seluruh propinsi dengan populasi terbesar terdapat di Propinsi Jawa Barat dengan angka mencapai 41,15 juta jiwa dan yang terkecil di Propinsi Papua Barat yang hanya mencapai 673 ribu jiwa. Dari sisi pajak per kapita dalam suatu propinsi, maka akan diperoleh jumlah pajak penerimaan pajak per kapita yang tertinggi terdapat pada Propinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp15,82 juta, sedangkan yang terendah di Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai Rp215 ribu rupiah.

4.2.2.2. Luas Daratan

Luas daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut data ini yang tersebar dalam 33 propinsi adalah mencapai 1.910.661,50 KM². Daerah dengan luas daratan terluas adalah Propinsi Papua dengan luas 319.039 KM² dan yang paling sempit adalah Propinsi DKI Jakarta dengan luas 664 KM². DKI Jakarta dengan luas wilayah daratan yang paling sempit, namun sebagaimana telah dikemukakan pada deskripsi penerimaan PBB dan BPHTB di atas, justru merupakan daerah dengan realisasi penerimaan pajak jenis ini yang tertinggi yaitu dengan nilai Rp4.113,33 milyar. Sedangkan Propinsi Papua dengan wilayah daratan terluas penerimaan PBB dan BPHTB-nya senilai Rp911,41 milyar.

4.2.2.3. PDRB

Propinsi yang PDRB-nya tertinggi adalah DKI Jakarta dengan nilai Rp566,45 triliun, kemudian disusul oleh Propinsi Jawa Timur dengan nilai Rp534,92 triliun, dan propinsi dengan PDRB ketiga adalah Jawa Barat dengan nilai PDRB Rp526,22 triliun. Sedangkan tiga propinsi yang terendah PDRB-nya

adalah Maluku Utara dengan nilai Rp3,16 triliun, Gorontalo Rp4,76 triliun, dan Propinsi Maluku Rp5,70 triliun.

Propinsi Maluku Utara walaupun nilai PDRB-nya merupakan yang terendah, namun *tax ratio* regionalnya merupakan propinsi yang paling tinggi diantara propinsi yang lain yaitu dengan tingkat rasio 24,9%. DKI Jakarta, disamping merupakan propinsi dengan PDRB yang tertinggi juga *tax ratio* regionalnya tinggi yaitu 24,8%.

4.2.2.4. Industri

Hasil industri masing-masing propinsi merupakan produk manufaktur yang dihasilkan propinsi tersebut dalam suatu periode tertentu. Menurut data, hasil industri terbesar diproduksi oleh Propinsi Jawa Barat dengan nilai Rp236,63 triliun dan yang terendah dengan nilai Rp264,18 milyar yang dihasilkan oleh Propinsi Gorontalo. Namun rasio penerimaan pajak terhadap produk manufaktur yang dihasilkan Jawa Barat termasuk yang terendah kedua yaitu dengan rasio 10,04%. Sedangkan yang terendah adalah Propinsi Jawa Tengah dengan rasio 9,69%.

Propinsi yang rasio penerimaan pajak terhadap produk manufaktur yang dihasilkan yang tertinggi adalah Propinsi Papua dengan rasio 344,08% disusul oleh Propinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur dengan rasio masing-masing 300,51% dan 284,42%.

4.2.2.5. APBD

APBD merupakan alokasi anggaran pengeluaran yang terdapat pada suatu propinsi yaitu merupakan kumulasi alokasi pengeluaran yang dianggarkan oleh pemerintah daerah baik pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota. Alokasi APBD yang terbanyak yaitu sebesar Rp36,56 triliun terdapat pada Propinsi Jawa Timur, sedangkan yang terendah pada Propinsi Sulawesi Barat dengan nilai Rp2,41 triliun.

4.2.2.6. DIPA

DIPA merupakan alokasi anggaran yang digunakan oleh DJP untuk pemungutan pajak. Alokasi anggaran ini merupakan kumulasi dari jumlah

anggaran dari kantor-kantor unit vertikal DJP yang berada dalam suatu wilayah propinsi. Data alokasi anggaran pemungutan pajak menunjukkan bahwa pengalokasian terbesar berada di Propinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp444 milyar. Alokasi anggaran pemungutan pajak di DKI Jakarta ini diluar alokasi anggaran pada Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Khusus, serta diluar alokasi anggaran pada unit kerja Kantor Pusat DJP. Sedangkan alokasi anggaran yang terkecil adalah di Propinsi Gorontalo.

Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajaknya, alokasi anggaran untuk pemungutan pajak di DKI Jakarta sebesar 0,32% sedangkan Propinsi Gorontalo sebesar 3,32%. Propinsi yang proporsi alokasi anggarannya paling besar adalah Propinsi Sulawesi Barat 11,99% dari perolehan pajak yang dapat direalisasikannya.

4.2.2.7. Jumlah Karyawan Tetap

Jumlah karyawan tetap merupakan jumlah pekerja formal yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja propinsi setempat. Jumlah tenaga kerja formal yang tertinggi dengan jumlah 58.348 orang adalah pada Propinsi DKI Jakarta dan jumlah karyawan yang paling sedikit adalah Propinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah 1.134 orang.

Karyawan tetap suatu propinsi merupakan subyek PPh Pasal 21 yang merupakan salah satu jenis pajak pemotongan dan pemungutan (*withholding tax*) yang dikenakan kepada subyek pajak karyawan atau pegawai yang bekerja pada suatu lembaga/organisasi yang pengenaannya dilakukan dengan pemotongan gaji/upah oleh bendaharawan/juru bayar gaji/upah dari organisasi/lembaga tersebut untuk kemudian disetorkan oleh pemungut/pemotong ke rekening kas negara. Propinsi DKI Jakarta dengan jumlah karyawan tetapnya yang terbanyak sejalan dengan jumlah PPh Pasal 21 yang diperolehnya yaitu dengan nilai sebesar Rp15.435,32 milyar, sedangkan Propinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah karyawan tetapnya paling sedikit, perolehan PPh Pasal 21-nya sebesar Rp242,45 milyar.

4.3. Hasil dan Analisis Regresi

Dalam uraian hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi ini diperoleh *tax ratio* regional potensial suatu propinsi yang berdasarkan pada tujuh variabel yang diasumsikan dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Dengan kata lain *tax ratio* regional potensial tersebut merupakan fungsi dari variabel-variabel: jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB, Industri yang dihasilkan, jumlah karyawan tetap, DIPA, dan APBD dalam suatu propinsi. Namun sebelum menguraikan *tax ratio* regional potensial suatu propinsi, terlebih dahulu akan diuraikan *tax ratio* regional aktual yang merupakan *tax ratio* regional yang sesungguhnya dicapai suatu propinsi dalam tahun 2008.

4.3.1. Tax Ratio Regional Aktual

Dari hasil pengolahan data diperoleh *tax ratio* regional aktual. *Tax ratio* regional aktual yang dihasilkan oleh masing-masing propinsi adalah merupakan perbandingan antara penerimaan pajak yang diperoleh pada tahun 2008 dengan PDRB yang dihasilkan propinsi tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa urutan *tax ratio* regional aktual untuk masing-masing propinsi adalah sebagai berikut; pada urutan tiga teratas, Propinsi Maluku Utara merupakan propinsi dengan *tax ratio* regional yang tertinggi dengan angka ratio 24,9%. Propinsi yang *tax ratio* regionalnya kedua tertinggi adalah Propinsi DKI Jakarta dengan angka ratio 24,8% dan yang teratas ketiga adalah Propinsi Papua Barat dengan angka ratio 17,4%.

Dari tiga propinsi yang tergolong kedalam *tax ratio* regional aktual dengan kelompok tertinggi, hanya Propinsi DKI Jakarta yang penerimaan pajaknya paling banyak serta PDRB-nya juga paling banyak. Penerimaan pajak Propinsi DKI Jakarta Rp140,37 triliun dan PDRB yang dihasilkan Rp566,45 triliun. Propinsi Maluku Utara walaupun *tax ratio* regional aktualnya tertinggi, namun tergolong dalam propinsi dengan penerimaan pajak dan PDRB-nya rendah dengan nilai Rp787,34 milyar. Demikian juga dengan Propinsi Papua Barat.

Sedangkan untuk urutan tiga terbawah, Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan propinsi dengan *tax ratio* regional aktual yang terendah dengan angka

ratio 3%. Propinsi yang *tax ratio* regional aktualnya terendah kedua adalah Propinsi Jawa Tengah dengan angka ratio 3,1% dan yang terendah ketiga adalah Propinsi Sumatera Barat dengan angka ratio 3,4%. Sebagai propinsi dengan *tax ratio* regional aktual yang merupakan urutan kedua terendah, Propinsi Jawa Tengah sesungguhnya termasuk kelompok propinsi dengan penerimaan pajaknya tinggi yaitu sebesar Rp9,73 triliun atau merupakan urutan keempat secara nasional dan PDRB yang dihasilkannya juga merupakan urutan keempat dengan nilai Rp314,428 triliun.

Secara keseluruhan urutan *tax ratio* regional aktual untuk masing-masing propinsi adalah sebagai tampak dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Urutan Tax Ratio Regional Aktual
Tahun 2008

NO	PROPINSI	TAX RATIO AKTUAL	NO	PROPINSI	TAX RATIO AKTUAL
1	Maluku Utara	24.9	18	Jawa Barat	4.5
2	DKI Jakarta	24.8	19	Kal. Barat	4.5
3	Papua Barat	17.4	20	D.I. Y.	4.5
4	Maluku	14.2	21	Kal. Timur	4.4
5	Banten	8.3	22	Kep. Babel	4.2
6	Jambi	7.3	23	Sul. Tengah	3.9
7	Kep. Riau	6.6	24	NAD	3.8
8	Bali	6.5	25	Sul. Utara	3.8
9	Kal. Selatan	6.3	26	Jawa Timur	3.7
10	Kal. Tengah	6.3	27	Riau	3.7
11	Gorontalo	6.2	28	Sul. Tenggara	3.7
12	Papua	5.6	29	Sul. Barat	3.7
13	Bengkulu	5.4	30	Lampung	3.5
14	Sul. Selatan	5.3	31	Sum. Barat	3.4
15	Sum. Utara	5.0	32	Jawa Tengah	3.1
16	NTT	4.8	33	NTB	3.0
17	Sum. Selatan	4.6			

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Rendahnya *tax ratio* regional ini seiring dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendri Purnomo Djati (2004) bahwa penyebab rendahnya *tax ratio*

Indonesia yang paling utama adalah kelemahan sistem administrasi perpajakan. Kemudian masalah pokok yang ada dalam administrasi perpajakan adalah soal kesenjangan (*gap*) dan bukan soal penerimaan pajak (*revenue*). Hal ini dijelaskan oleh Richard M. Bird dan Milka Casanegra de Jantscher dalam bukunya *Improving Tax Administration In Developing Countries* (IMF, 1992) sebagaimana dikutip oleh Hendri Purnomo Djati (2004) yang mengatakan bahwa dalam administrasi pajak yang pertama-tama adalah masalah kesenjangan kepatuhan (*compliance gap*) yaitu kesenjangan antara pajak yang seharusnya dibayar dengan realisasi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Keberhasilan pengumpulan pajak hanya merupakan akibat dari semakin rendahnya/semipitnya kesenjangan kepatuhan tersebut. Artinya semakin patuh masyarakat membayar pajak berarti kesenjangan kepatuhannya semakin rendah yang berarti pula pemungutan pajak semakin berhasil. Demikian sebaliknya untuk kesenjangan kepatuhan yang tinggi, berarti merupakan semakin tidak patuhnya masyarakat dalam membayar pajak dimana realisasi pajak yang dibayar jauh lebih rendah dibandingkan dengan pajak yang seharusnya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk daerah/propinsi yang tingkat *tax ratio* regionalnya rendah, pada daerah tersebut terdapat kelemahan administrasi perpajakan. Dalam administrasi perpajakan pada daerah/propinsi tersebut terdapat kesenjangan kepatuhan yang tinggi. Artinya pada propinsi tersebut terdapat kesenjangan yang tinggi antara pajak yang seharusnya dibayar dengan realisasi pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang berada pada propinsi tersebut.

Maka berdasarkan data pada tabel di atas Propinsi Maluku Utara, DKI Jakarta, Papua Barat, dan Maluku merupakan empat propinsi yang *tax ratio* regionalnya tertinggi yaitu di atas 10% diantara propinsi-propinsi yang lain. Artinya pada propinsi tersebut kesenjangan kepatuhan pajaknya paling rendah diantara propinsi yang lain. Sedangkan Propinsi Lampung, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat merupakan propinsi yang *tax ratio* regionalnya terendah. Pada propinsi yang *tax ratio* regionalnya rendah mengindikasikan

tingkat kesenjangan kepatuhannya tinggi, yang berarti pada propinsi tersebut realisasi penerimaan pajak belum sesuai dengan yang seharusnya.

4.3.2. Tax Ratio Regional Potensial dan Residual

Tax ratio regional potensial pada penelitian ini adalah merupakan fungsi dari variabel-variabel: jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB, Industri yang dihasilkan, jumlah karyawan tetap, DIPA, dan APBD dalam suatu propinsi.

Dari hasil pengolahan data diperoleh *tax ratio* regional potensial diketahui bahwa urutan *tax ratio* regional potensial untuk masing-masing propinsi adalah sebagai berikut; pada urutan tiga teratas, Propinsi DKI Jakarta merupakan propinsi dengan *tax ratio* potensial yang tertinggi dengan angka ratio 23,69%. Propinsi yang *tax ratio* potensialnya kedua tertinggi adalah Propinsi Kalimantan Timur dengan angka ratio 7,57% dan yang teratas ketiga adalah Propinsi Sumatera Utara dengan angka ratio 7,42%.

Dari tiga propinsi yang tergolong kedalam *tax ratio* regional potensial dengan kelompok tertinggi, ketiga propinsi tersebut baik penerimaan pajaknya maupun PDRB-nya juga termasuk kelompok yang realisasinya tinggi. DKI Jakarta penerimaan pajaknya Rp140,37 triliun dengan PDRB yang dihasilkan senilai Rp566,45 triliun. Propinsi Kalimantan Timur penerimaan pajaknya Rp9,27 triliun dengan PDRB yang dihasilkan senilai Rp39,44 triliun. Propinsi Sumatera Utara penerimaan pajaknya Rp9,12 triliun dengan PDRB yang dihasilkan senilai Rp181,82 triliun.

Sedangkan untuk urutan tiga terbawah, Propinsi Jawa Barat merupakan propinsi dengan *tax ratio* regional potensial yang terendah dengan angka ratio 1,78%. Propinsi yang *tax ratio* regional potensialnya terendah kedua adalah Propinsi Jawa Tengah dengan angka ratio 3,09% dan yang terendah ketiga adalah Propinsi Jawa Timur dengan angka ratio 4,27%. Ketiga propinsi di Pulau Jawa ini termasuk kedalam kelompok propinsi yang *tax ratio* regional potensial rendah dibandingkan dengan propinsi-propinsi yang lain padahal penerimaan pajak dan PDRB-nya tergolong dalam kelompok dengan penerimaan pajak dan PDRB tinggi. Jawa Barat penerimaan pajaknya Rp23,76 triliun dengan PDRB yang

dihasilkan senilai Rp526,22 triliun. Jawa Tengah penerimaan pajaknya Rp9,73 triliun dengan PDRB yang dihasilkan senilai Rp312,43 triliun. Propinsi Jawa Timur penerimaan pajaknya Rp19,93 triliun dengan PDRB yang dihasilkan senilai Rp534,92 triliun.

Kondisi pada ketiga propinsi yang penerimaan pajak dan PDRB yang dihasilkannya tinggi, namun *tax ratio* regional potensialnya termasuk rendah karena jumlah penduduk pada ketiga propinsi tersebut merupakan yang terbanyak diantara propinsi yang lain. Jumlah penduduk ini berpengaruh terhadap PDRB per kapita suatu wilayah. Secara keseluruhan urutan *tax ratio* regional potensial untuk masing-masing propinsi adalah sebagai tampak dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Urutan Tax Ratio Regional Potensial
Tahun 2008

NO	PROPINSI	TAX RATIO POTENSIAL	NO	PROPINSI	TAX RATIO POTENSIAL
1	DKI Jakarta	23.69	18	NTB	6.52
2	Kal. Timur	7.57	19	Bengkulu	6.52
3	Sum. Utara	7.42	20	NTT	6.47
4	Bali	7.35	21	Gorontalo	6.45
5	Kep. Riau	7.31	22	Kal. Selatan	6.28
6	Papua	7.25	23	Sum. Barat	6.26
7	Sul. Barat	7.21	24	Sul. Tenggara	6.14
8	Sul. Tengah	7.05	25	Kal. Barat	6.02
9	Sul. Utara	6.69	26	Riau	5.88
10	Jambi	6.66	27	Banten	5.51
11	Papua Barat	6.64	28	Sul. Selatan	5.48
12	Kal. Tengah	6.63	29	Lampung	5.00
13	NAD	6.63	30	Sum. Selatan	4.99
14	Maluku	6.61	31	Jawa Timur	4.27
15	D.I. Y.	6.58	32	Jawa Tengah	3.09
16	Kep. Babel	6.57	33	Jawa Barat	1.78
17	Maluku Utara	6.52			

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari kedua *tax ratio* regional tersebut bila dikomparasikan akan diperoleh *tax ratio* regional residual yang merupakan selisih antara *tax ratio* regional aktual dengan *tax ratio* regional potensial. Dari selisih kedua *tax ratio* regional ini dapat

dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok propinsi yaitu kelompok propinsi yang *tax ratio* regional residualnya positif dan kelompok propinsi yang *tax ratio* regional residualnya negatif.

Kelompok propinsi dengan *tax ratio* regional yang residualnya positif adalah merupakan kelompok propinsi yang jumlah penerimaan pajaknya dapat direalisasikan di atas potensinya. Dengan residualnya yang positif, maka bisa digunakan sebagai salah satu indikator untuk melakukan penilaian terhadap kinerja penerimaan pajak yang lebih baik. Sebaliknya kelompok propinsi dengan *tax ratio* regional yang residualnya negatif, berarti jumlah penerimaan pajak yang dapat direalisasikan masih dibawah potensinya. Berdasarkan hasil pengolahan data, kelompok propinsi dengan nilai residual positif terdapat 9 propinsi yaitu Propinsi Maluku Utara, Papua Barat, Maluku, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah.

Tabel 4.4
Kelompok Propinsi Dengan Tax Ratio Residual Positif

NO	PROPINSI	Tax Ratio Regional Aktual	Tax Ratio Regional Potensial	Tax Ratio Regional Residual	Persentase Residual Thd Aktual
1	Maluku Utara	24.9	6.52	18.39	73.86%
2	Papua Barat	17.4	6.64	10.72	61.55%
3	Maluku	14.2	6.61	7.56	53.24%
4	Banten	8.3	5.51	2.77	33.37%
5	Jawa Barat	4.5	1.78	2.74	60.89%
6	DKI Jakarta	24.8	23.69	1.09	4.40%
7	Jambi	7.3	6.66	0.63	8.63%
8	Kal. Selatan	6.3	6.28	0.05	0.79%
9	Jawa Tengah	3.1	3.09	0.02	0.65%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa Propinsi Maluku Utara merupakan propinsi dengan *tax ratio* regional yang nilai residualnya paling tinggi diantara sembilan propinsi yang lain yaitu dengan nilai residu sebesar 18.39 atau sebesar 73,86% dari *tax ratio* regional aktual. Hal ini menunjukkan bahwa propinsi ini lebih dapat merealisasikan penerimaan pajak melebihi potensi yang dimilikinya

dibandingkan dengan propinsi yang lainnya. Potensi *tax ratio* regional propinsi ini sebesar 6.5 sedangkan *tax ratio* regional aktualnya sebesar 24.9.

Sedangkan kelompok propinsi yang nilai residualnya negatif adalah terdiri dari 24 propinsi sebagaimana tampak pada Tabel 4.5 Propinsi yang paling rendah residualnya adalah Propinsi Sulawesi Barat dengan nilai -3.55, kemudian berturut-turut Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur dengan masing-masing nilai *tax ratio* regional residualnya -3.49 dan -3.20.

Tabel 4.5
Kelompok Propinsi Dengan Tax Ratio Residual Negatif

NO	PROPINSI	Tax Ratio Regional Aktual	Tax Ratio Regional Potensial	Tax Ratio Regional Residual	Persentase Residual Thd Aktual
1	Sul. Barat	3.7	7.21	- 3.55	-95.95%
2	NTB	3.0	6.52	- 3.49	-116.33%
3	Kal. Timur	4.4	7.57	- 3.20	-72.73%
4	Sul. Tengah	3.9	7.05	- 3.14	-80.51%
5	Sul. Utara	3.8	6.69	- 2.88	-75.79%
6	NAD	3.8	6.63	- 2.87	-75.53%
7	Sum. Barat	3.4	6.26	- 2.82	-82.94%
8	Sum. Utara	5.0	7.42	- 2.41	-48.20%
9	Sul. Tenggara	3.7	6.14	- 2.41	-65.14%
10	Kep. Babel	4.2	6.57	- 2.39	-56.90%
11	Riau	3.7	5.88	- 2.16	-58.38%
12	D.I.Y	4.5	6.58	- 2.03	-45.11%
13	Papua	5.6	7.25	- 1.67	-29.82%
14	NTT	4.8	6.47	- 1.62	-33.75%
15	Kal. Barat	4.5	6.02	- 1.53	-34.00%
16	Lampung	3.5	5.00	- 1.53	-43.71%
17	Bengkulu	5.4	6.52	- 1.07	-19.81%
18	Bali	6.5	7.35	- 0.82	-12.62%
19	Kep. Riau	6.6	7.31	- 0.74	-11.21%
20	Jawa Timur	3.7	4.27	- 0.54	-14.59%
21	Sum. Selatan	4.6	4.99	- 0.39	-8.48%
22	Kal. Tengah	6.3	6.63	- 0.35	-5.56%
23	Gorontalo	6.2	6.45	- 0.21	-3.39%
24	Sul.Selatan	5.3	5.48	- 0.14	-2.64%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Untuk dapat mengetahui tingkat pemanfaatan kapasitas pajak suatu negara selama suatu kurun waktu tertentu dapat diketahui dari *index of tax effort*-nya. *Index of tax effort* adalah merupakan pembagian antara *actual tax ratio* dengan *potential tax ratio*. Maka untuk dapat mengetahui *index of tax effort* suatu propinsi dapat menggunakan data sebagaimana telah dikemukakan di atas yaitu dengan cara membagi *tax ratio* regional aktual dengan *tax ratio* regional potensial. Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6
Index Of Tax Effort Regional Tahun 2008

NO	PROPINSI	INDEX OF TAX EFFORT	NO	PROPINSI	INDEX OF TAX EFFORT
1	Maluku Utara	3.82	17	Bengkulu	0.83
2	Papua Barat	2.62	18	Papua	0.77
3	Jawa Barat	2.53	19	Kal. Barat	0.75
4	Maluku	2.15	20	NTT	0.74
5	Banten	1.51	21	Lampung	0.70
6	Jambi	1.10	22	D.I. Y	0.68
			23	Sum. Utara	0.67
7	DKI Jakarta	1.05	24	Kep. Babel	0.64
8	Kal. Selatan	1.00	25	Riau	0.63
9	Jawa Tengah	1.00	26	Sul. Tenggara	0.60
10	Sul. Selatan	0.97	27	Kal. Timur	0.58
11	Gorontalo	0.96	28	NAD	0.57
12	Kal. Tengah	0.95	20	Sul. Utara	0.57
13	Sum. Selatan	0.92	30	Sul. Tengah	0.55
14	Kep. Riau	0.90	31	Sum. Barat	0.54
15	Bali	0.88	32	Sul. Barat	0.51
16	Jawa Timur	0.87	33	NTB	0.46

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Zamroni (2004) yang mengutip Cheiliah (1971) bahwa suatu negara dikategorikan mempunyai tingkat pemanfaatan kapasitas pemajakan tinggi apabila *index of tax effort*-nya diatas 1.10, untuk yang tingkat pemanfaatan kapasitas pemajakan sedang apabila *index of tax effort*-nya antara 0.84 sampai dengan 1.10, dan untuk kategori tingkat pemanfaatan kapasitas pemajakan rendah apabila *index of tax effort*-nya dibawah 0.84.

Berdasarkan kriteria kategorisasi pemanfaatan kapasitas pemajakan tersebut, maka propinsi-propinsi di Indonesia berdasarkan *index of tax effort* regionalnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagaimana tampak dalam tabel 4.6 yaitu:

- a. Propinsi dengan tingkat pemanfaatan kapasitas pemajakan tinggi yang meliputi 6 propinsi yang terdiri dari Propinsi Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Barat, Maluku, Banten, dan Jambi.
- b. Propinsi dengan tingkat pemanfaatan kapasitas pemajakan sedang yang meliputi 10 propinsi yang terdiri dari Propinsi DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bali, dan Jawa Timur.
- c. Propinsi dengan tingkat pemanfaatan kapasitas pemajakan rendah yang meliputi 17 propinsi yang terdiri dari Propinsi Bengkulu, Papua, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, D.I. Yogyakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Nangru Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

4.3.3. Variabel yang Mempengaruhi Tax Ratio Regional

Dari hasil regresi untuk 33 propinsi terhadap tujuh variabel bebas yang diasumsikan dapat mempengaruhi penerimaan pajak pada masing-masing propinsi yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB, Industri yang dihasilkan, jumlah karyawan tetap, DIPA, dan APBD dalam suatu propinsi, didapati hasil bahwa dari ketujuh variabel tersebut hanya dua variabel bebas yang dimasukkan dalam perhitungan regresi yaitu variabel jumlah DIPA yang dialokasikan pada suatu propinsi dan variabel jumlah penduduk yang berdomisili pada propinsi tersebut.

Hasil regresi tersebut menunjukkan DIPA yang dialokasikan untuk memungut pajak dan variabel jumlah penduduk yang berdomisili pada propinsi tersebut merupakan variabel yang mempengaruhi *tax ratio* regional.

Variabel DIPA adalah merupakan jumlah anggaran dana yang dialokasikan pada suatu propinsi yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran

upaya pemungutan pajak pada propinsi tersebut. Variabel ini merupakan salah satu dari dua variabel yang mempengaruhi *tax ratio* regional diantara variabel-variabel yang lain cukup sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, dimana memang sudah seharusnya dengan alokasi anggaran yang semakin besar untuk memungut pajak diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang lebih besar. Dengan penerimaan pajak yang semakin besar pada suatu propinsi, maka pengaruh terhadap *tax ratio* regionalnya juga seharusnya semakin tinggi. Sehingga cukup beralasan bila variabel DIPA termasuk variabel yang dapat mempengaruhi *tax ratio* regional.

Variabel berikutnya yang berpengaruh terhadap *tax ratio* regional adalah variabel jumlah penduduk yang berdomisili pada propinsi berkenaan. Hal sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Judisseno (1997) yang mengatakan bahwa peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Dengan penerimaan pajak yang semakin besar pada suatu propinsi karena jumlah penduduk, maka pengaruh terhadap *tax ratio* regionalnya juga seharusnya semakin tinggi. Sehingga variabel jumlah pendudukpun cukup beralasan bila berdasarkan hasil pengolahan data dapat mempengaruhi *tax ratio* regional.

4.4. Hasil dan Analisis Pengelompokan

Metode analisis pengelompokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah Metode K-Mean, dimana jumlah kelompok yang akan dibentuk ditentukan terlebih dahulu, yang dalam hal ini ditentukan menjadi 5 kelompok.

Pengelompokan dilakukan dengan berdasarkan pada variabel-variabel umlah Penduduk, Jumlah Karyawan Tetap, Luas Wilayah Daratan, Industri, APBD, dan DIPA. Adapun hasil yang diperoleh dari pengelompokan propinsi tersebut adalah:

- a. Kelompok pertama terdiri dari lima propinsi yaitu Propinsi Nangru Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, dan Papua.

- b. Kelompok kedua terdiri dari 22 propinsi yaitu; Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat.

Tabel 4.7
Kelompok Propinsi

Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V
\bar{X} TRA = 8.58 \bar{X} TRP = 10.17 \bar{X} TRR = -1.61	\bar{X} TRA = 6.93 \bar{X} TRP = 6.50 \bar{X} TRR = 0.43	\bar{X} TRA = 4.95 \bar{X} TRP = 5.23 \bar{X} TRR = -0.26	\bar{X} TRA = 3.77 \bar{X} TRP = 3.05 \bar{X} TRR = 0.74	\bar{X} TRA = 4.40 \bar{X} TRP = 7.57 \bar{X} TRR = -3.20
NAD	Kep. Riau	Sum. Selatan	Jawa Barat	Kal. Timur
Sumut	Sum. Barat	Sul. Selatan	Jawa Tengah	
Riau	Jambi & Banten		Jawa Timur	
DKI Jakarta	Kep. Babel			
Papua	Bengkulu			
	Lampung			
	D.I. Yogyakarta			
	Kal. Barat			
	Kal. Selatan			
	Kal. Tengah			
	Sul. Barat & Sul. Tenggara			
	Sul. Utara & Sul. Tengah			
	Gorontalo			
	Bali & NTB			
	NTT & Maluku			
	Maluku Utara			
	Papua Barat			

Keterangan:
 TRA : Tax Ratio Regional Aktual
 TRP : Tax Ratio Regional Potensial
 TRR : Tax Ratio Regional Residual

Sumber: Hasil Olah Data

- c. Kelompok ketiga terdiri dari dua propinsi yaitu; Propinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.
- d. Kelompok keempat terdiri dari tiga propinsi yaitu; Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

- e. Kelompok kelima hanya beranggotakan satu propinsi yaitu Kalimantan Timur.

Dari hasil pengelompokan propinsi berdasarkan Tabel 4.7 di atas, bila dipandang dari sisi rata-rata *tax ratio* regional aktualnya, maka kelompok pertama merupakan kelompok propinsi dengan mempunyai rata-rata yang tertinggi yaitu 8.58. Selanjutnya kelompok kedua dengan rata-rata *tax ratio* regional aktualnya 6.93, kemudian kelompok ketiga dan lima dengan nilai rata-rata untuk masing-masing kelompok 4.95 dan 4.40. Sedangkan kelompok yang terakhir adalah kelompok empat dengan rata-rata 3.77.

Kondisi di atas jika dilihat dari sudut pandang rata-rata *tax ratio* regional aktual, kelompok propinsi yang paling tinggi rata-ratanya merupakan kelompok propinsi yang realisasi penerimaan pajak terhadap PDRB yang dihasilkannya paling tinggi. Kondisi sebaliknya untuk kelompok propinsi yang nilai rata-rata *tax ratio* regional aktualnya paling kecil, maka dapat diartikan kelompok propinsi tersebut realisasi penerimaan pajak terhadap PDRB yang dihasilkannya paling rendah bila dibandingkan dengan kelompok propinsi yang lain.

Menurut *tax ratio* regional potensial, kelompok pertama merupakan kelompok propinsi yang mempunyai potensi penerimaan pajak terhadap PDRB yang dihasilkannya paling tinggi dengan nilai rata-rata 10.17 yang anggota propinsinya terdiri dari Nangru Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, dan Papua. Kemudian pada urutan kedua tertinggi adalah kelompok propinsi kelima dengan nilai rata-rata 7.57. Urutan ketiga, keempat, dan kelima berturut-turut adalah kelompok kedua, kelompok ketiga dan kelompok keempat.

Nilai rata-rata yang terakhir adalah rata-rata *tax ratio* regional residual, dimana kelompok keempat merupakan kelompok propinsi yang nilai rata-rata *tax ratio* regional residualnya paling tinggi (0.74) yang anggotanya terdiri dari Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nilai ini mengindikasikan bahwa pada kelompok keempat ini secara umum realisasi penerimaan pajak terhadap PDRB yang dihasilkannya melampaui potensi yang dimiliki kelompok tersebut. Pada kelompok keempat juga dijumpai keadaan dimana rata-rata nilai *tax ratio* regional potensial dan aktualnya termasuk kelompok dengan nilai rata-rata

paling kecil, namun merupakan kelompok propinsi yang paling tinggi realisasinya melampaui potensi yang dimilikinya.

Sementara untuk kelompok pertama, dimana rata-rata *tax ratio* regional potensial dan aktualnya yang tertinggi diantara kelompok propinsi yang lain, namun rata-rata *tax ratio* regional residualnya justru rendah yaitu -1.61. Hal ini menunjukkan bahwa pada kelompok propinsi ini secara umum tidak dapat memanfaatkan potensi yang dikilikinya untuk direalisasikan.

Secara keseluruhan jika dilihat dari kemampuan merealisasikan potensi yang dimilikinya, maka kelompok keempat merupakan kelompok propinsi yang terbaik karena realisasi terhadap potensi yang dimilikinya merupakan yang tertinggi, kemudian yang terbaik kedua adalah kelompok kedua. Sedangkan kelompok yang lainnya tidak dapat merealisasikan potensi yang dimilikinya karena nilai rata-rata *tax ratio* regional residualnya negatif. Kelompok yang realisasinya dibawah potensi yang dimilikinya yaitu kelompok ketiga, kelompok pertama, dan kelompok kelima.

---oo0oo---

Tabel 4.1
Kontribusi Penerimaan Pajak

	<i>No</i>	<i>PPh Migas</i>	<i>PPh Psl 21</i>	<i>PPh OP</i>	<i>PPh Badan</i>	<i>PPN & PPn BM</i>	<i>PBB & BPHTB</i>	<i>Meterai & PTLL</i>	<i>Total Pajak</i>
	P R O P I N S I								
Tertinggi	1.	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta	Jawa Barat	DKI Jakarta
	2.	Sum. Barat	Jawa Barat	Jawa Timur	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Barat	Jawa Timur	Jawa Barat
	3.	Sum. Utara	Jawa Timur	Jawa Tengah	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Timur	Jawa Tengah	Jawa Timur
Terendah	1.	Gorontalo	Maluku	Kal. Tengah	Gorontalo	Maluku Utara	Sul. Barat	Papua Barat	Sul. Tenggara
	2.	Sul. Barat	Gorontalo	Gorontalo	Sul. Tenggara	Gorontalo	Sul. Utara	Maluku Utara	Gorontalo
	3.	Banten	Sul. Barat	Sul. Barat	Sul. Barat	Sul. Barat	Gorontalo	Sul. Barat	Sul. Barat

Sumber: Hasil Olah Data

Keterangan: untuk baris tertinggi, yang paling atas merupakan penerima pajak yang terbesar, sedangkan untuk baris terendah, yang paling bawah merupakan penerima pajak terkecil.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data dan analisis yang dilakukan didapati beberapa kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan dan hipotesa yang diajukan pada awal penelitian.

5.1.1. Deskripsi Penerimaan Pajak

- Rata-rata penerimaan pajak per propinsi adalah senilai Rp8.289,70 milyar dengan penerimaan pajak yang terendah adalah Rp226,72 milyar dan yang tertinggi Rp140.371 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi *gap* penerimaan antar propinsi, atau dengan kata lain disatu sisi terdapat propinsi yang kontribusinya penerimaan pajaknya sangat tinggi, sedangkan pada sisi lain merupakan kebalikannya.
- Secara umum, Propinsi DKI Jakarta menempati urutan tertinggi dalam setiap jenis penerimaan pajak. Propinsi DKI Jakarta tertinggi di hampir seluruh jenis pajak, hal ini sejalan dengan kontribusi penerimaan pajak DKI Jakarta yang secara keseluruhan mencapai 24,55% atau hampir seperempat penerimaan pajak diperoleh di DKI Jakarta. Hal ini juga menunjukkan gambaran bahwa kinerja penerimaan pajak di DKI Jakarta paling baik untuk seluruh jenis pajak dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain.
- Pada sisi lain, propinsi yang selalu menjadi urutan terbawah untuk seluruh jenis penerimaan pajaknya adalah Propinsi Sulawesi Barat. Kondisi Propinsi Sulawesi Barat juga beralasan, karena selain merupakan propinsi bentukan baru, struktur perekonomiannya juga masih terkonsentrasi bidang pertanian yang belum banyak dikenakan pajak. Faktor lainnya adalah belum memadainya sarana dan prasarana pemungutan pajak, dimana untuk satu propinsi hanya ada satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan satu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). KP2KP merupakan kantor bantu KPP.

- Bila dilihat dari kontribusi menurut pulau terhadap penerimaan pajak, maka Pulau Jawa merupakan pulau yang memberikan kontribusi sumbangan tertinggi terhadap penerimaan pajak, hal ini tampak dari Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah yang selalu berada dalam posisi tiga besar pada setiap jenis penerimaan pajak. Sedangkan Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku merupakan pulau yang memberikan kontribusi terendah terhadap penerimaan pajak, kecuali wilayah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan merupakan pengecualian karena pada wilayah ini sudah mulai terjadi industrialisasi dan sedang diproyeksikan untuk dijadikan pusat perekonomian untuk Wilayah Indonesia Timur. Untuk propinsi-propinsi yang berada di pulau Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya dapat disimpulkan bahwa mereka berada pada level menengah penerimaan pajak.
- Kondisi di atas sejalan dengan kondisi di Pulau Jawa yang struktur perekonomiannya tidak lagi hanya bertumpu pada sektor pertanian, akan tetapi sudah bertumpu pada sektor manufaktur dan jasa. Kondisi sebaliknya struktur perekonomian di Pulau Sulawesi dan Maluku, dimana sektor pertanian dan pertambangan masih sangat dominan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sektor pertanian belum memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak karena sektor ini lebih banyak yang belum dikenakan pajak. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2009 dinyatakan bahwa kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan terhadap PPh Non Migas pada tahun 2008 adalah sebesar 4,6%. Dan kontribusi sektor tersebut terhadap PPN dalam negeri sebesar 3,5%.

5.1.2. Deskripsi Variabel Potensi Penerimaan Pajak

- Deskripsi secara umum menunjukkan bahwa proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2008 mencapai 230,16 juta jiwa yang mendiami luas daratan seluas 1,91 juta km². Propinsi dengan populasi penduduk terbanyak adalah Jawa Barat dengan total proyeksi penduduk mencapai 41,15 juta jiwa, sedangkan propinsi yang penduduknya paling sedikit adalah Propinsi Papua Barat dengan jumlah 673 ribu jiwa. Untuk propinsi

yang terluas wilayah daratannya adalah Propinsi Papua dengan luas wilayah 319.039 km², sedangkan yang paling sempit adalah Propinsi DKI Jakarta dengan luas wilayah daratan 664 km².

- Pulau Jawa menghasilkan PDRB yang tertinggi, hal ini tampak dari tiga besar propinsi penghasil PDRB terbesar ada di Pulau Jawa yaitu Propinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan nilai masing-masing sebesar Rp566,45 triliun, Rp534,92 triliun, dan Rp526,22 triliun. Sedangkan *tax ratio* regionalnya yang tertinggi adalah Propinsi Maluku Utara, dan DKI Jakarta dengan angka masing-masing 24,9% dan 24,8%.
- APBD yang dialokasikan untuk operasional pemerintahan daerah yang paling besar dialokasikan oleh Propinsi Jawa Timur dengan nilai Rp36,56 triliun sedangkan yang alokasi APBD-nya paling rendah adalah Propinsi Sulawesi Barat dengan nilai Rp2,41 triliun. Sedangkan alokasi anggaran dana yang dipergunakan untuk pemungutan pajak (DIPA) yang terbanyak pada Propinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp444 milyar diluar anggaran yang dialokasikan Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus.

5. 2. Hasil dan Analisis Regresi

- Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa urutan *tax ratio* regional aktual dengan urutan tiga teratas adalah Propinsi Maluku Utara dengan *tax ratio* regional yang tertinggi dengan angka rasio 24,9%, Propinsi DKI Jakarta dengan angka rasio 24,8% pada urutan kedua, dan urutan ketiga adalah Propinsi Papua Barat dengan angka rasio 17,4%. Sedangkan yang paling rendah adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan angka rasio 3%.
- Untuk urutan *tax ratio* regional potensial mulai yang tertinggi adalah Propinsi DKI Jakarta merupakan propinsi dengan *tax ratio* potensial yang tertinggi dengan angka ratio 23,69%. Propinsi yang *tax ratio* potensialnya kedua tertinggi adalah Propinsi Kalimantan Timur dengan angka ratio 7,57% dan yang teratas ketiga adalah Propinsi Sumatera Utara dengan

angka ratio 7,42%. Sedangkan yang teendah adalah Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

- Propinsi yang *tax ratio* regional dengan residualnya positif hanya meliputi 9 propinsi dari 33 propinsi. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 27,27% propinsi yang dapat merealisasikan penerimaan pajak terhadap PDRB yang dihasilkannya dapat melebihi potensi yang dimilikinya.
- Berdasarkan kriteria kategorisasi pemanfaatan kapasitas pemajakan, maka propinsi-propinsi di Indonesia berdasarkan *index of tax effort* regionalnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu: Propinsi dengan tingkat pemanfaatan kapasitas pemajakan tinggi yang meliputi 6 propinsi yang terdiri dari Propinsi Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Barat, Maluku, Banten, dan Jambi. Propinsi dengan tingkat pemanfaatan kapasitas pemajakan sedang yang meliputi 10 propinsi yang terdiri dari Propinsi DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bali, dan Jawa Timur. Propinsi dengan tingkat pemanfaatan kapasitas pemajakan rendah yang meliputi 17 propinsi yang terdiri dari Propinsi Bengkulu, Papua, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, D.I. Yogyakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Nangru Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat.
- Dari hasil regresi juga diperoleh kesimpulan, bahwa terdapat dua variabel yang dapat mempengaruhi perbedaan *tax ratio* regional yaitu variabel DIPA dan variabel Jumlah Penduduk.

5. 3. Hasil dan Analisis Pengelompokan

- Hasil analisis pengelompokan diperoleh lima kelompok yang itu kelompok pertama dengan anggota 5 propinsi, kelompok kedua dengan anggota 22 propinsi, kelompok ketiga dengan anggota 2 propinsi, kelompok keempat dengan anggota 3 propinsi, dan kelompok kelima dengan anggota satu propinsi.

- Dari kelima kelompok tersebut kelompok pertama merupakan kelompok propinsi yang rata-rata *tax ratio* regional aktual dan rata-rata *tax ratio* regional potensialnya paling baik, namun rata-rata *tax ratio* regional residualnya jelek yaitu negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata pada kelompok propinsi ini tidak dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk direalisasikan.
- Kelompok keempat merupakan kelompok propinsi yang rata-rata *tax ratio* regional aktual dan rata-rata *tax ratio* regional potensialnya paling rendah, namun rata-rata *tax ratio* regional residualnya paling baik yaitu paling besar diantara kelompok yang lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata pada kelompok propinsi ini dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk direalisasikan.

5.4. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian terhadap data yang dianalisis dalam penulisan tesis ini dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan terutama dalam penyusunan kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dibidang pajak.

- 1) Upaya meningkatkan penerimaan pajak dapat lebih diintensifkan pada propinsi yang tergolong kedalam propinsi dengan *tax ratio* regional residualnya negatif. Dengan *tax ratio* regional residualnya yang negatif berarti masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum terealisasi dalam penerimaan pajak tahun tersebut.
- 2) Menurut hasil penelitian ini upaya peningkatan penerimaan pajak dapat mempertimbangkan variabel variabel DIPA, dan Jumlah Penduduk.
 - Variabel DIPA merupakan variabel yang dapat dikontrol langsung oleh penentu kebijakan, dimana dengan semakin besar DIPA yang dialokasikan, pada taraf tertentu dapat meningkatkan penerimaan pajak.
 - Variabel Jumlah Penduduk merupakan variabel yang mempengaruhi jumlah wajib pajak yang pada akhirnya dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

Sedangkan saran sebagai upaya untuk perbaikan penelitian yang sejenis adalah:

- 1) Agar menggunakan beberapa tahun periode penerimaan pajak, sehingga dengan mempunyai horizon waktu yang lebih banyak sehingga dapat mengetahui perubahan komposisi propinsi dalam memperbandingkan antar kelompok-kelompok propinsi yang terbentuk.
- 2) Karena dalam penelitian ini tidak dapat menjelaskan faktor yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* regional pada sebagian besar propinsi dengan tingkat penerimaan pajak yang tinggi, maka disarankan untuk dilakukan penelitian tersendiri. Hal ini dirasa perlu mengingat ada indikasi dari setiap unsur PDRB yang dihasilkan tidak dapat dikenai pajak seluruhnya karena adanya kebijakan lain, seperti kebijakan dalam rangka menstimulus untuk meningkatkan investasi asing di dalam negeri (*tax holiday*). Penelitian terhadap hal ini diharapkan dapat diketahui besaran ketidakterserapannya PDRB dalam penerimaan pajak sebagai akibat dari adanya kebijakan yang mengikutinya.

-oo0oo-

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badan Analisa Fiskal Depkeu. *Bunga Rampai Kebijakan Fiskal*, Jakarta, Agustus 2002.
- Badan Analisa Fiskal Depkeu. *Kebijakan Fiskal Memasuki Milenium Ketiga (Menyongsong Era Indonesia Baru)*, Jakarta, 2002
- Badan Pusat Statistik. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2003-2007*, Jakarta, Oktober 2008
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. *Modul Keuangan Negara*, edisi 02, tahun 2008
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. *Modul Perencanaan dan Penganggaran*, edisi 01, tahun 2008
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. *Modul Pelaksanaan Anggaran*, edisi 02, tahun 2008
- Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta: Cetakan Kedua 2007.
- Republik Indonesia. *Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2009*.
- Republik Indonesia. *Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2010*.
- Republik Indonesia. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004 s.d. 2007*
- Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Tahun 2005
- Santoso, Singgih. *Buku Latihan SPSS Statistik Multivariat*, PT. Elex Media Komputindo, cetakan ketiga, Jakarta, tahun 2004
- Stiglitz, Joseph E. *Economic Of The Public Sector*, W.W. Norton & Company, Third Edition, New York, 1999
- Suparmoko. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE Yogyakarta, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Tahun 2000
- Supranto, J. *Analisis Multivariate: Arti dan Interpretasi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Upal , J.S. *Tax Reform In Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta: 2003.

KARYA ILMIAH

- Absari, Dhiani Tresna, *Perencanaan Pembuatan Sistem Penunjang Keputusan Dengan Menggunakan Metode Clustering Pada Studi Kelayakan Pembukaan Jaringan Trayek Angkutan Kota (Sistem Penunjang Keputusan Jaringan Trayek Angkutan Kota)* Tahun 2004.
- Djati, Hendri Purnomo, *Pengaruh Pertambahan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*, Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2004
- Nurmantu, Safri, *Dampak Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan dan Keadilan Dalam Perpajakan*, Pascasarjana Universitas Indonesia, 1998.
- Saefullah, Entang, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Hubungannya Dengan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2002.
- Santoso, Wahyu, *Analisis Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia)*, Jurnal Keuangan Publik, Vol. 5 No. 1, Oktober 2008.
- Setiyaji, Gunawan dan Hidayat Amir, *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia* Jurnal Ekonomi, Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta Edisi November 2005
- Suryana, Camelia, *Analisis Pengaruh Penerimaan Negara dari Sektor Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2005.
- Wibowo, Tri, *Dampak Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Nasional*, Jurnal KIPAS, Vol. 2, Nomor 24, edisi November 2000
- Zamroni, Achmad, *Kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Periode Tahun 1984-2003*, Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 jo. Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-06/PJ/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Distribusi Rencana Penerimaan PPh Non Migas, PPN dan PPn BM, Pajak Lainnya, serta PBB dan BPHTB.

PUBLIKASI ELEKTRONIK

http://daps.bps.go.id/file_artikel/65/ANALISIS%20DISKRIMINAN.pdf

www.jonathansarwono.info/mvariat/multivariat.htm

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Tax Ratio	6.698	5.5370	33
Penduduk	6.975E3	9983.8928	33
LuasDaratan	5.790E4	65855.1824	33
Industri	2.774E4	51806.7953	33
APBD	1.186E7	9.4062E6	33
DIPA	5.893E4	85553.3095	33
KaryawanTTP	1.122E4	12210.5840	33

Correlations

		Tax Ratio	Penduduk	LuasDaratan	Industri	APBD	DIPA	KarynTTP
Pearson Correlation	Tax Ratio	1.000	-.171	-.105	-.017	-.139	.355	.234
	Penduduk	-.171	1.000	-.107	.911	.825	.595	.609
	LuasDaratan	-.105	-.107	1.000	-.045	.270	-.152	-.132
	Industri	-.017	.911	-.045	1.000	.838	.697	.664
	APBD	-.139	.825	.270	.838	1.000	.630	.658
	DIPA	.355	.595	-.152	.697	.630	1.000	.891
	KaryawanTTP	.234	.609	-.132	.664	.658	.891	1.000
Sig. (1-tailed)	Tax Ratio	.	.171	.281	.464	.220	.021	.095
	Penduduk	.171	.	.277	.000	.000	.000	.000
	LuasDaratan	.281	.277	.	.402	.064	.199	.231
	Industri	.464	.000	.402	.	.000	.000	.000
	APBD	.220	.000	.064	.000	.	.000	.000
	DIPA	.021	.000	.199	.000	.000	.	.000
	KaryawanTTP	.095	.000	.231	.000	.000	.000	.
N	Tax Ratio	33	33	33	33	33	33	33
	Penduduk	33	33	33	33	33	33	33
	LuasDaratan	33	33	33	33	33	33	33
	Industri	33	33	33	33	33	33	33
	APBD	33	33	33	33	33	33	33
	DIPA	33	33	33	33	33	33	33
	KaryawanTTP	33	33	33	33	33	33	33

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DIPA		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).
2	Penduduk		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).

a. Dependent Variable: Tax Ratio

Model Summary^c

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.355 ^a	.126	.098	5.2592	
2	.593 ^b	.352	.309	4.6030	1.676

a. Predictors: (Constant), DIPA

Model Summary^c

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.355 ^a	.126	.098	5.2592	
2	.593 ^b	.352	.309	4.6030	1.676

a. Predictors: (Constant), DIPA

b. Predictors: (Constant), DIPA, Penduduk

c. Dependent Variable: Tax Ratio

ANOVA^c

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	123.618	1	123.618	4.469	.043 ^a
	Residual	857.438	31	27.659		
	Total	981.056	32			
2	Regression	345.425	2	172.713	8.152	.001 ^b
	Residual	635.631	30	21.188		
	Total	981.056	32			

a. Predictors: (Constant), DIPA

b. Predictors: (Constant), DIPA, Penduduk

c. Dependent Variable: Tax Ratio

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.344	1.117		4.783	.000		
	DIPA	2.297E-5	.000	.355	2.114	.043	1.000	1.000
2	(Constant)	6.290	1.021		6.163	.000		
	DIPA	4.575E-5	.000	.707	3.866	.001	.646	1.548
	Penduduk	.000	.000	-.592	-3.236	.003	.646	1.548

a. Dependent Variable: Tax Ratio

Excluded Variables^c

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics		
						Tolerance	VIF	Minimum Tolerance
1	Penduduk	-.592 ^a	-3.236	.003	-.509	.646	1.548	.646
	LuasDaratan	-.052 ^a	-.302	.765	-.055	.977	1.024	.977
	Industri	-.513 ^a	-2.347	.026	-.394	.514	1.945	.514
	APBD	-.602 ^a	-3.159	.004	-.500	.603	1.659	.603
	KaryawanTTP	-.397 ^a	-1.077	.290	-.193	.207	4.838	.207
2	LuasDaratan	-.062 ^b	-.410	.685	-.076	.976	1.024	.638
	Industri	.220 ^b	.541	.592	.100	.133	7.494	.133
	APBD	-.334 ^b	-1.233	.228	-.223	.290	3.451	.290
	KaryawanTTP	-.178 ^b	-.530	.600	-.098	.197	5.078	.197

a. Predictors in the Model: (Constant), DIPA

b. Predictors in the Model: (Constant), DIPA, Penduduk

c. Dependent Variable: Tax Ratio

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	DIPA	Penduduk
1	1	1.573	1.000	.21	.21	
	2	.427	1.920	.79	.79	
2	1	2.257	1.000	.08	.07	.07
	2	.472	2.186	.92	.14	.13
	3	.271	2.887	.00	.79	.81

a. Dependent Variable: Tax Ratio

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1.776	23.691	6.698	3.2855	33
Residual	-3.5538	18.3912	.0000	4.4568	33
Std. Predicted Value	-1.498	5.172	.000	1.000	33
Std. Residual	-.772	3.995	.000	.968	33

a. Dependent Variable: Tax Ratio



Case Processing Summary^{a,b}

Cases					
Valid		Missing		Total	
N	Percent	N	Percent	N	Percent
33	97.1	1	2.9	34	100.0

a. Squared Euclidean Distance used

b. Average Linkage (Between Groups)

Average Linkage (Between Groups)

Agglomeration Schedule

Stage	Cluster Combined		Coefficients	Stage Cluster First Appears		Next Stage
	Cluster 1	Cluster 2		Cluster 1	Cluster 2	
1	9	31	9.137E8	0	0	4
2	18	30	1.203E9	0	0	7
3	15	24	5.379E9	0	0	11
4	8	9	6.249E9	0	1	19
5	17	19	9.621E9	0	0	6
6	10	17	1.870E10	0	5	7
7	10	18	2.289E10	6	2	15
8	23	25	3.033E10	0	0	17
9	7	21	3.350E10	0	0	29
10	22	26	3.642E10	0	0	23
11	4	15	5.043E10	0	3	17
12	29	32	5.084E10	0	0	14
13	1	3	1.051E11	0	0	20
14	6	29	1.384E11	0	12	21
15	10	12	1.389E11	7	0	22
16	13	14	1.533E11	0	0	27
17	4	23	1.650E11	11	8	19
18	2	33	3.800E11	0	0	20
19	4	8	4.281E11	17	4	21
20	1	2	8.936E11	13	18	24
21	4	6	1.041E12	19	14	26
22	10	28	1.350E12	15	0	25
23	22	27	1.724E12	10	0	26
24	1	11	3.461E12	20	0	29
25	5	10	5.071E12	0	22	28
26	4	22	7.082E12	21	23	28
27	13	16	1.205E13	16	0	30
28	4	5	1.473E13	26	25	31
29	1	7	2.741E13	24	9	31
30	13	20	4.321E13	27	0	32
31	1	4	1.405E14	29	28	32
32	1	13	5.982E14	31	30	0

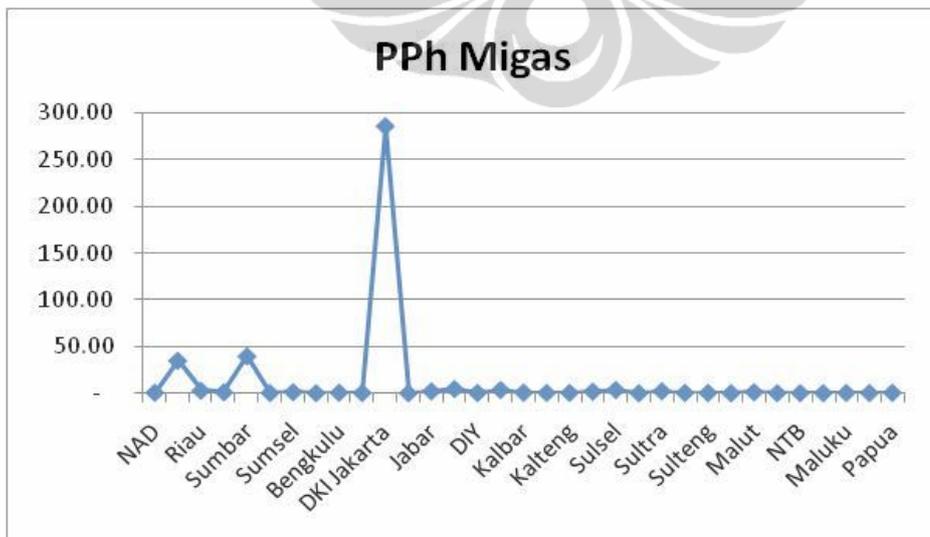
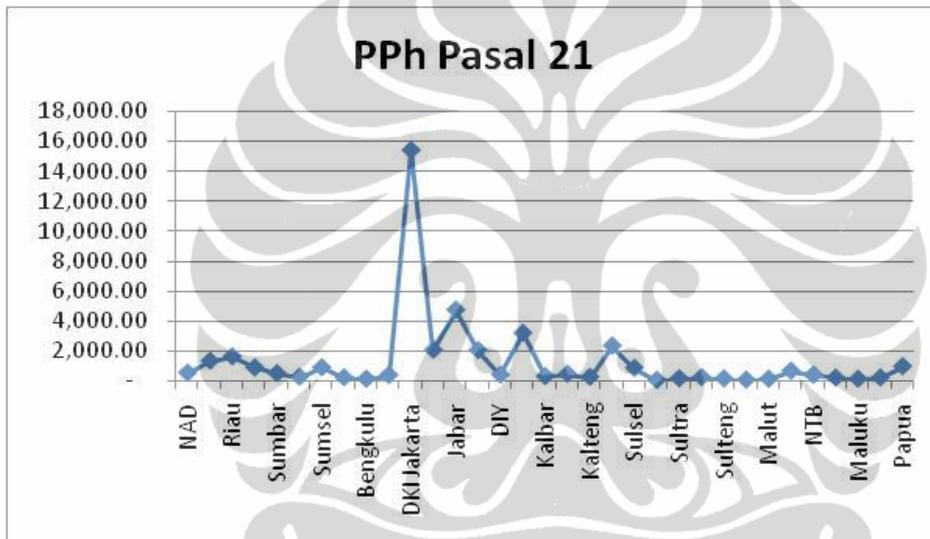
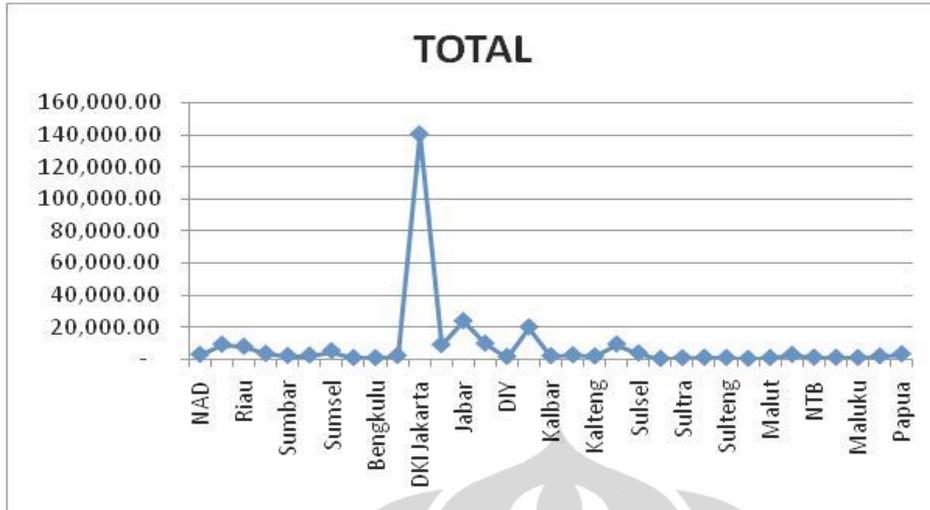
Cluster Membership

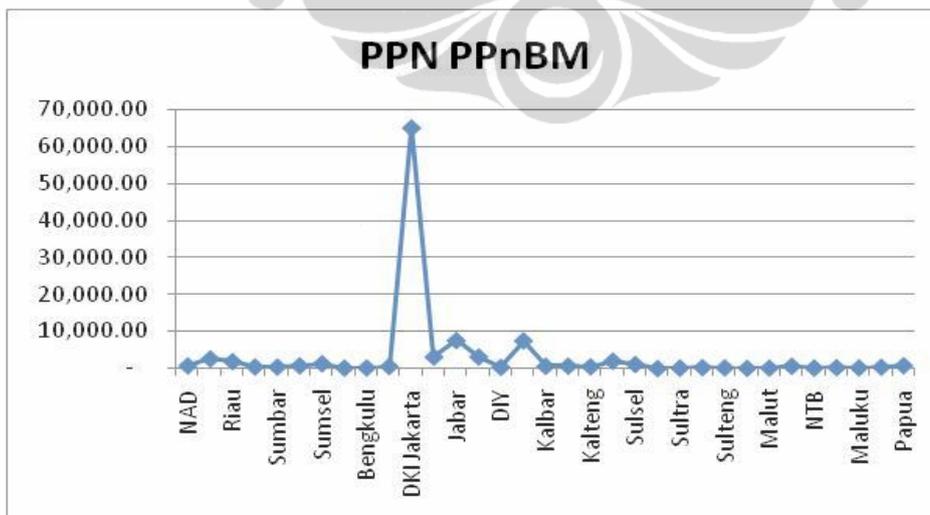
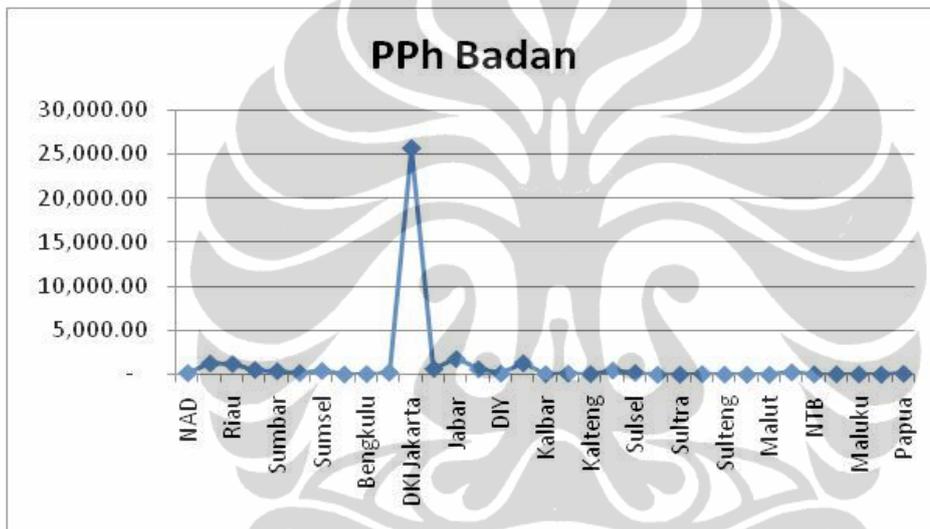
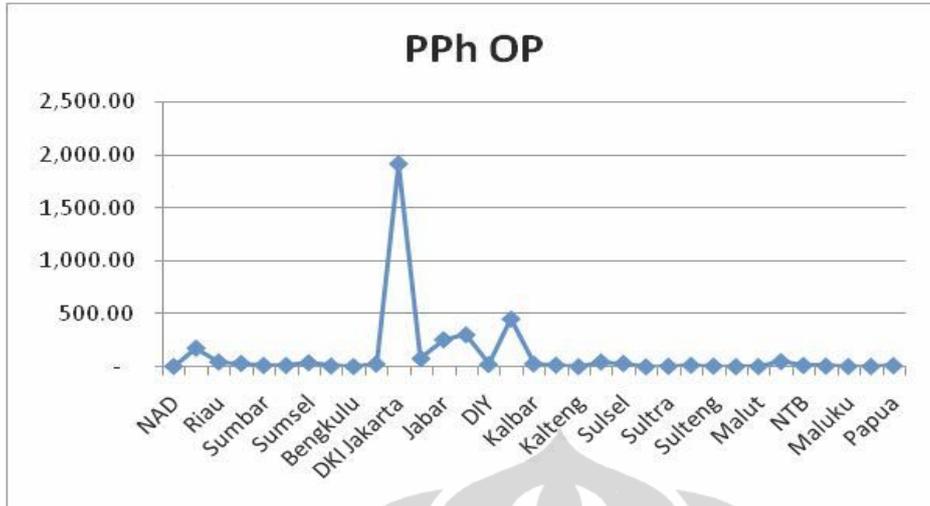
Case	5 Clusters
1:Nangroe Aceh Darussalam	1
2:Sumatera Utara	1
3:Riau	1
4:Kepulauan Riau	2
5:Sumatera Barat	2
6:Jambi	2
7:Sumatera Selatan	3
8:Kepulauan Bangka Belitung	2
9:Bengkulu	2
10:Lampung	2
11:DKI Jakarta	1
12:Banten	2
13:Jawa Barat	4
14:Jawa Tengah	4
15:Daerah Istimewa Yogyakarta	2
16:Jawa Timur	4
17:Kalimantan Barat	2
18:Kalimantan Selatan	2
19:Kalimantan Tengah	2
20:Kalimantan Timur	5
21:Sulawesi Selatan	3
22:Sulawesi Barat	2
23:Sulawesi Tenggara	2
24:Sulawesi Utara	2
25:Sulawesi Tengah	2
26:Gorontalo	2
27:Maluku Utara	2
28:Bali	2
29:Nusa Tenggara Barat	2
30:Nusa Tenggara Timur	2
31:Maluku	2
32:Papua Barat	2
33:Papua	1

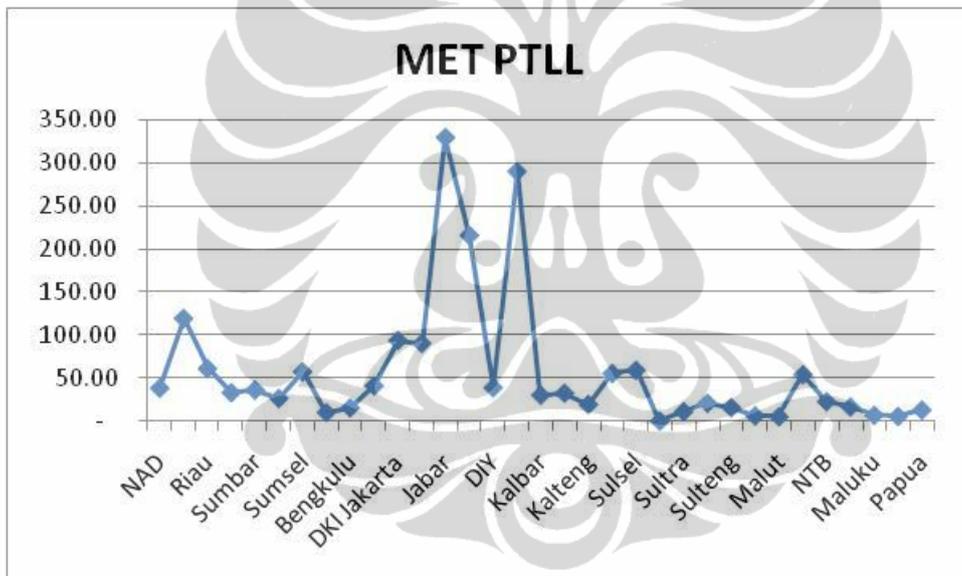
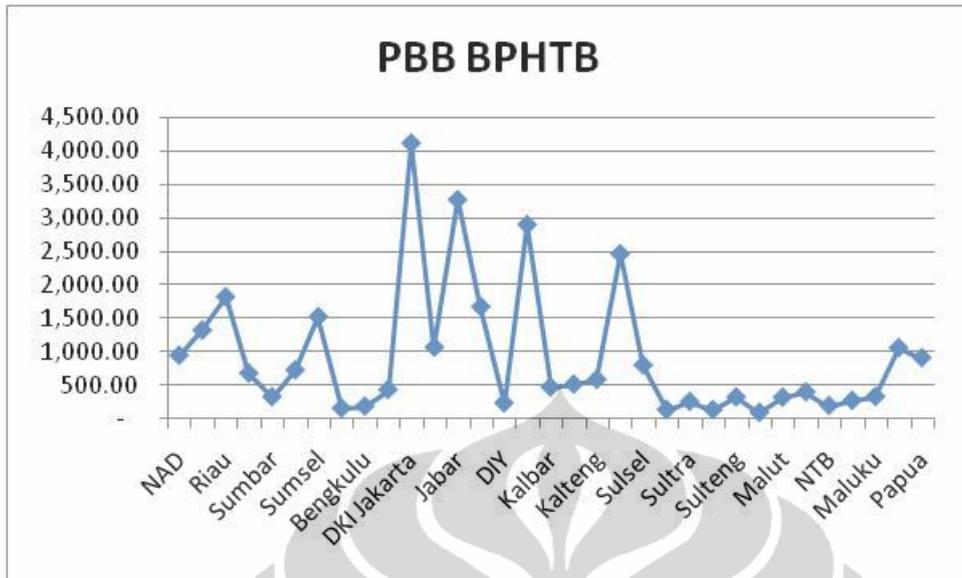
Rekapitulasi Data
Regresi dan Clustering

Lampiran III

No	Propinsi	Tax Ratio	Penduduk	LuasDaratan	Industri	APBD	DIPA	KarywnTTP	PRE_1	RES_1	CLU5_1
1	Nangroe Aceh Darussalam	3.8	4,084.8	57,956.00	7,935.0	19,376,232	36,686.2	15,782	6.62827	-2.8718	1
2	Sumatera Utara	5	12,914.6	72,981.20	45,531.2	18,625,022	117,378.8	16,411	7.423	-2.40898	1
3	Riau	3.7	6,907.9	87,023.70	39,156.0	19,054,867	40,645.1	8,998	5.88325	-2.164	1
4	Kepulauan Riau	6.6	1,284.8	8,201.70	24,203.4	5,155,324	31,490.3	2,749	7.30912	-0.73509	2
5	Sumatera Barat	3.4	4,480.7	42,012.90	7,179.2	10,428,401	31,370.9	21,287	6.25524	-2.81848	2
6	Jambi	7.3	2,809.0	50,058.20	3,829.0	6,399,580	28,223.3	8,835	6.65965	0.62698	2
7	Sumatera Selatan	4.6	7,087.6	91,592.40	25,305.9	13,877,601	22,354.0	15,814	4.98755	-0.3872	3
8	Kep. Bangka Belitung	4.2	1,015.7	16,424.10	4,028.8	4,886,850	13,455.5	1,408	6.57238	-2.39351	2
9	Bengkulu	5.4	1,717.6	19,919.30	510.5	4,818,098	17,237.9	2,639	6.51515	-1.07277	2
10	Lampung	3.5	7,623.2	34,623.80	8,314.0	8,520,970	26,425.4	25,562	4.99809	-1.5297	2
11	DKI Jakarta	24.8	8,872.9	664.00	90,446.6	20,523,322	444,008.3	58,348	23.6909	1.09007	1
12	Banten	8.3	10,106.6	9,662.90	51,386.3	8,089,757	55,499.9	4,042	5.51345	2.76558	2
13	Jawa Barat	4.5	41,145.7	35,377.80	236,629.0	33,272,208	196,377.6	30,673	1.77561	2.73925	4
14	Jawa Tengah	3.1	32,234.6	32,800.70	100,426.1	32,906,973	161,279.3	22,093	3.09331	0.02253	4
15	D.I. Yogyakarta	4.5	3,375.6	3,133.20	4,475.7	5,411,998	30,540.0	3,419	6.57976	-2.03069	2
16	Jawa Timur	3.7	35,989.9	47,799.80	153,815.1	36,555,810	213,955.4	36,915	4.27109	-0.54477	4
17	Kalimantan Barat	4.5	4,620.3	147,307.00	7,719.5	8,418,693	27,188.4	7,906	6.01811	-1.53485	2
18	Kalimantan Selatan	6.3	3,396.7	38,744.20	4,364.1	8,388,243	24,036.6	10,437	6.27533	0.05401	2
19	Kalimantan Tengah	6.3	2,317.7	153,564.50	2,319.9	8,516,354	24,027.5	1,134	6.62888	-0.34905	2
20	Kalimantan Timur	4.4	3,037.0	204,534.30	73,806.4	27,884,593	49,753.9	9,420	7.5698	-3.20077	5
21	Sulawesi Selatan	5.3	8,791.4	46,717.50	9,158.6	14,052,786	45,344.5	8,550	5.48034	-0.13675	3
22	Sulawesi Barat	3.7	972.0	16,787.20	479.3	2,413,216	27,188.4	3,484	7.21494	-3.55385	2
23	Sulawesi Tenggara	3.7	2,251.4	38,067.70	1,419.1	5,596,018	12,891.8	5,593	6.14122	-2.40678	2
24	Sulawesi Utara	3.8	2,223.3	13,581.60	2,124.1	5,339,680	24,749.1	1,235	6.69286	-2.87843	2
25	Sulawesi Tengah	3.9	2,544.7	61,841.30	1,559.6	5,767,140	34,799.3	6,620	7.04718	-3.13858	2
26	Gorontalo	6.2	893.1	11,257.10	264.2	2,603,189	9,849.0	6,879	6.44761	-0.2109	2
27	Maluku Utara	24.9	969.5	31,982.50	423.4	3,817,575	12,075.5	3,422	6.52441	18.39122	2
28	Bali	6.5	3,510.2	5,780.10	3,804.9	7,232,736	48,373.7	7,326	7.35142	-0.81556	2
29	Nusa Tenggara Barat	3	4,562.0	18,572.30	1,083.5	5,940,233	37,644.5	3,555	6.51556	-3.48798	2
30	Nusa Tenggara Timur	4.8	4,301.8	48,718.10	325.9	8,357,063	34,729.6	5,695	6.46757	-1.62398	2
31	Maluku	14.2	1,327.8	46,914.00	268.7	4,804,524	16,517.6	4,854	6.61007	7.55912	2
32	Papua Barat	17.4	673.0	97,024.30	2,084.5	6,150,080	12,535.5	3,416	6.64271	10.719	2
33	Papua	5.6	2,119.9	319,036.10	896.9	18,067,581	36,126.9	5,646	7.24727	-1.6733	1







REALISASI PENERIMAAN PAJAK

Lampiran V

No	Propinsi	PPh Migas	PPh Pasal 21	PPh OP	PPh Badan	PPN PPhBM	PBB BPHTB	MET PTLL	TOTAL
1	Nangroe Aceh Darussalam	0.51	516.81	4.44	179.95	767.53	946.94	38.28	2,749.59
2	Sumatera Utara	34.59	1,314.53	176.19	1,274.96	2,662.29	1,320.26	119.06	9,116.48
3	Riau	2.62	1,614.22	45.82	1,205.36	1,931.18	1,819.17	60.81	7,810.50
4	Kepulauan Riau	1.00	874.81	32.57	557.67	493.31	680.97	32.89	3,407.08
5	Sumatera Barat	39.35	483.10	13.72	402.27	453.65	327.94	36.00	2,055.15
6	Jambi	0.23	252.68	13.07	198.91	814.66	726.84	26.20	2,337.31
7	Sumatera Selatan	1.10	881.95	38.87	434.03	1,354.19	1,523.32	57.09	5,055.59
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.09	205.01	7.53	36.33	175.41	156.27	9.89	747.81
9	Bengkulu	0.54	113.41	2.62	74.57	216.64	187.79	15.24	697.73
10	Lampung	0.21	368.50	26.51	246.19	605.96	435.39	40.85	2,113.01
11	DKI Jakarta	285.05	15,435.32	1,914.52	25,729.25	65,132.39	4,113.33	93.60	140,371.60
12	Banten	-	2,046.30	77.66	670.03	3,175.24	1,066.55	90.10	8,894.32
13	Jawa Barat	2.04	4,744.29	255.14	1,765.04	7,623.80	3,269.08	329.25	23,758.08
14	Jawa Tengah	4.52	2,035.87	301.16	611.97	3,197.92	1,673.67	215.58	9,734.78
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	0.26	385.42	21.71	122.07	386.26	234.14	38.73	1,497.41
16	Jawa Timur	3.41	3,183.60	450.56	1,300.42	7,541.90	2,899.00	289.77	19,932.84
17	Kalimantan Barat	0.61	287.88	28.79	59.44	671.05	474.07	30.11	1,904.43
18	Kalimantan Selatan	0.38	448.76	15.78	132.88	717.39	515.37	32.40	2,496.21
19	Kalimantan Tengah	0.40	242.45	2.44	68.81	551.33	587.08	19.26	1,753.33
20	Kalimantan Timur	1.74	2,335.72	46.36	477.77	2,037.03	2,461.59	55.21	9,266.57
21	Sulawesi Selatan	3.47	838.11	31.37	213.46	1,180.38	799.44	58.91	3,701.61
22	Sulawesi Barat	0.01	29.77	0.27	0.85	45.39	135.09	0.02	226.72
23	Sulawesi Tenggara	2.12	139.04	5.06	2.68	173.10	256.57	10.98	670.45
24	Sulawesi Utara	0.33	227.93	15.44	66.47	287.66	134.72	20.67	925.92
25	Sulawesi Tengah	0.22	139.90	6.44	22.81	233.23	324.66	15.56	849.87
26	Gorontalo	0.02	53.85	2.43	3.44	99.85	94.05	6.05	296.91
27	Maluku Utara	1.05	112.74	2.81	3.81	169.50	320.10	4.97	787.34
28	Bali	0.09	647.49	49.96	258.04	662.83	400.54	53.76	2,767.05
29	Nusa Tenggara Barat	0.13	383.43	13.71	45.53	197.16	196.73	22.45	1,014.80
30	Nusa Tenggara Timur	0.08	194.00	7.47	53.70	270.80	273.82	16.28	926.92
31	Maluku	0.39	107.55	3.70	33.94	233.99	332.39	6.71	807.47
32	Papua Barat	0.22	201.46	3.42	6.20	409.15	1,060.33	5.41	1,800.38
33	Papua	0.47	947.78	10.89	108.90	814.05	911.41	12.83	3,086.07

Sumber: DJP

VARIABEL POTENSI PENERIMAAN PAJAK

Lampiran VI

No	Propinsi	Penduduk (Ribuan)	Luas Daratan (KM2)	PDRB (Jutaan)	Industri (Milyar)	APBD (Jutaan)	DIPA (Ribuan)	KaryawanTTP (satuan)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4,084.80	57,956.00	73,196,270	7,935.04	19,376,232	36,686,178	15,782
2	Sumatera Utara	12,914.60	72,981.23	181,819,737	45,531.18	18,625,022	117,378,816	16,411
3	Riau	6,907.90	87,023.66	210,002,560	39,156.00	19,054,867	40,645,052	8,998
4	Kepulauan Riau	1,284.80	8,201.72	51,826,272	24,203.35	5,155,324	31,490,338	2,749
5	Sumatera Barat	4,480.70	42,012.89	59,799,045	7,179.24	10,428,401	31,370,919	21,287
6	Jambi	2,809.00	50,058.16	32,076,677	3,828.95	6,399,580	28,223,340	8,835
7	Sumatera Selatan	7,087.60	91,592.43	109,895,707	25,305.86	13,877,601	22,353,977	15,814
8	Kep. Bangka Belitung	1,015.70	16,424.06	17,895,017	4,028.84	4,886,850	13,455,533	1,408
9	Bengkulu	1,717.60	19,919.33	12,820,321	510.46	4,818,098	17,237,877	2,639
10	Lampung	7,623.20	34,623.80	60,921,966	8,313.99	8,520,970	26,425,353	25,562
11	DKI Jakarta	8,872.90	664.01	566,449,345	90,446.57	20,523,322	444,008,293	58,348
12	Banten	10,106.60	9,662.92	107,431,958	51,386.34	8,089,757	55,499,856	4,042
13	Jawa Barat	41,145.70	35,377.76	526,220,225	236,628.97	33,272,208	196,377,594	30,673
14	Jawa Tengah	32,234.60	32,800.69	312,428,807	100,426.11	32,906,973	161,279,347	22,093
15	DI Yogyakarta	3,375.60	3,133.15	32,916,736	4,475.68	5,411,998	30,540,027	3,419
16	Jawa Timur	35,989.90	47,799.75	534,919,333	153,815.08	36,555,810	213,955,382	36,915
17	Kalimantan Barat	4,620.30	147,307.00	42,478,601	7,719.49	8,418,693	27,188,358	7,906
18	Kalimantan Selatan	3,396.70	38,744.23	39,438,767	4,364.12	8,388,243	24,036,577	10,437
19	Kalimantan Tengah	2,317.70	153,564.50	27,920,072	2,319.86	8,516,354	24,027,499	1,134
20	Kalimantan Timur	3,037.00	204,534.34	212,096,644	73,806.38	27,884,593	49,753,907	9,420
21	Sulawesi Selatan	8,791.40	46,717.48	69,271,925	9,158.55	14,052,786	45,344,490	8,550
22	Sulawesi Barat	972.00	16,787.18	6,192,786	479.27	2,413,216	27,188,358	3,484
23	Sulawesi Tenggara	2,251.40	38,067.70	17,953,074	1,419.09	5,596,018	12,891,812	5,593
24	Sulawesi Utara	2,223.30	13,581.64	24,274,030	2,124.10	5,339,680	24,749,140	1,235
25	Sulawesi Tengah	2,544.70	61,841.29	21,743,606	1,559.57	5,767,140	34,799,284	6,620
26	Gorontalo	893.10	11,257.07	4,760,695	264.18	2,603,189	9,848,982	6,879
27	Maluku Utara	969.50	31,982.50	3,160,042	423.44	3,817,575	12,075,537	3,422
28	Bali	3,510.20	5,780.06	42,336,424	3,804.93	7,232,736	48,373,684	7,326
29	Nusa Tenggara Barat	4,562.00	18,572.32	33,518,591	1,083.50	5,940,233	37,644,498	3,555
30	Nusa Tenggara Timur	4,301.80	48,718.10	19,136,982	325.91	8,357,063	34,729,568	5,695
31	Maluku	1,327.80	46,914.03	5,698,799	268.72	4,804,524	16,517,574	4,854
32	Papua Barat	673.00	97,024.27	10,369,836	2,084.47	6,150,080	12,535,459	3,416
33	Papua	2,119.90	319,036.05	55,365,778	896.88	18,067,581	36,126,921	5,646

Sumber:

- BPS
- Peraturan Presiden Tentang Rincian Anggaran Tahun 2008 (Perpres No. 105 Tahun 2007)
- Ditjen PUM DEPdagRI
- Ditjen Perimbangan Keuangan, Depkeu

**Perkembangan PPh Non Migas Sektoral, 2005-2008
dan Perkiraan Realisasi 2009
(triliun rupiah)**

NO	URAIAN	2005		2006		2007		2008		2009	
		Real.	% thd Total	Perk Real.	% thd Total						
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	2.5	2.1	2.8	2	4.7	2.6	9.5	4.3	10.3	3.6
2	Pertambangan Migas	9.9	8.1	12.1	8.3	14.0	7.8	17.2	7.8	14.9	5.2
3	Pertambangan Bukan Migas	5.6	4.5	6.2	4.3	10.5	5.8	11.4	5.1	22.9	8.0
4	Penggalian	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.2	0.4	0.1
5	Industri Pengolahan	33.9	27.7	34.7	24.0	41.9	23.3	55.0	24.9	64.0	22.3
6	Listrik, Gas, dan Air Bersih	3	2.4	5.7	3.9	4.7	2.6	5.2	2.3	6.2	2.2
7	Konstruksi	2.5	2.0	3.1	2.1	4.8	2.7	5.0	2.3	6.7	2.3
8	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11.1	9.1	13.5	9.3	16.9	9.4	23.4	10.6	32.6	11.4
9	Pengangkutan dan Komunikasi	11.3	9.3	14.7	10.2	16.3	9.1	19.8	9.0	18.3	6.4
10	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	35.7	29.2	44.3	30.6	54.8	30.5	59.0	26.7	94.8	33.0
11	Jasa Lainnya	6.7	5.5	7.6	5.2	10.7	5.9	11.1	5.0	14.0	4.9
12	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	4.0	1.8	1.8	0.7
		122.4	100.0	145.0	100.0	179.7	100.0	221.0	100.0	287.0	100.0

Sumber: Departemen Keuangan RI

**Perkembangan PPN Dalam Negeri Sektoral, 2005 - 2008
dan Perkiraan Realisasi 2009
(triliun rupiah)**

NO	URAIAN	2005		2006		2007		2008		2009	
		Real.	% thd Total	Perk Real.	% thd Total						
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	1.6	2.8	1.8	2.2	2.0	2.0	3.0	2.6	1.9	1.5
2	Pertambangan Migas	2.9	5.2	16.8	21.0	14.6	14.5	17.6	15.1	22.5	18.1
3	Pertambangan Bukan Migas	0.8	1.4	1.3	1.6	1.8	1.8	1.4	1.2	1.0	0.8
4	Penggalian	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
5	Industri Pengolahan	18.5	33.2	22.3	27.9	28.6	28.4	37.7	32.3	37.4	30.2
6	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0.4	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.9	0.7
7	Konstruksi	4.3	7.7	6.2	7.8	12.0	11.9	10.5	9.0	11.3	9.1
8	Perdagangan, Hotel dan Restoran	10.6	19.0	12.8	16.0	17.9	17.8	19.5	16.7	21.9	17.6
9	Pengangkutan dan Komunikasi	6.1	10.9	6.6	8.2	8.1	8.1	8.7	7.4	8.2	6.6
10	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	7.7	13.7	8.4	10.6	10.8	10.8	9.2	7.9	9.7	7.8
11	Jasa Lainnya	1.3	2.4	1.6	2.0	2.3	2.2	2.4	2.0	2.4	1.9
12	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	1.5	2.7	1.5	1.9	1.9	1.9	5.9	5.1	6.6	5.3
		55.8	100.0	79.9	100.0	100.6	100.0	116.5	100.0	123.9	100.0

Sumber: Departemen Keuangan RI